

BAB IV

NEGARA DAN PEMERINTAHAN INDONESIA DALAM PANDANGAN ABDUL KAHAR MUZAKKAR

4.1 KEHIDUPAN ABDUL KAHAR MUZAKKAR

4.1.1 Masa Kecil Sampai Menjadi Seorang Letnan Kolonel

Abdul Kahar Muzakkar lahir pada tanggal 24 Maret 1921 di Desa Lanipa, kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu (dekat Palopo) di Pantai Barat laut Teluk Bone. Semasa kecilnya, Kahar Muzakkar lebih dikenal oleh keluarga dan masyarakat di Desanya dengan nama *La Domeng* yang berarti pemain *domino*. Syihabuddin (2006:96) menjelaskan bahwa, dia diberi nama demikian karena ayahnya sangat menyukai permainan domino. Adapun orang tuanya bernama Malinrang yang merupakan seorang petani yang cukup mampu, seorang keturunan bangsawan dan tergolong pada aristokrasi rendah (Al Chaidar, 1420 H:134).

Dalam strata kerajaan Luwu saat itu, kedua orang tuanya tergolong *to maradeka* atau orang yang merdeka. Mereka mempunyai sawah dan kopra yang luas dan kemampuan dagang yang mereka miliki, maka keluarga La Domeng menjadi keluarga yang disegani. Dalam Syihabuddin (2006:96), citra orang tua La Domeng setidaknya tergambar dari ungkapan berikut ini "*Orang baik-baik dan memiliki usaha, makanya dia itu mempunyai kehidupan ekonomi lebih tinggi dar rata-rata*

orang sekampungnya. Mungkin pak Kaharlah yang pertama kali naik sepeda”
(Syihabuddin 2006:96).

Tidak dapat dipungkiri bahwa Abdul Kahar Muzakkar dibentuk oleh tradisi yang sangat kental dan berpengaruh, yaitu tradisi kerajaan Luwu. Meskipun keluarganya hanya termasuk aristokrat kelas bawah (Barbara Sillar Harvey, 1989:434). Semenjak kecil dia sudah menunjukkan tanda dan ciri-ciri sebagai pejuang dan pembela. Dia senang bermain-main perang-perangan dengan teman sejawatnya. Oleh karena itu, dalam segala hal dia sering dijuluki sebagai komandan (Syihabuddin 2006:97).



Kahar Muzakkar, Panglima Divisi Hasanuddin Negara Islam Indonesia.

Gambar. 4.1 Abdul Kahar Muzakkar

(Diambil dari http://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Kahar_Muzakkar&usg=__zh- [18 Juni 2011])

Dengan kedudukan dan kemampuan orang tuanya sebagai seorang pedagang yang cukup kaya. Pada saat usianya mencapai tujuh belas tahun, orang tua La Domeng mempersiapkan biaya pendidikan yang sangat besar agar ia bisa melanjutkan pendidikan di Pulau Jawa, yaitu di Surakarta. Maka ia dikirim ke Surakarta untuk belajar di sebuah sekolah Perguruan Islam Mu'allimin (Kweekschool Muhammadiyah) dari tahun 1938 sampai tahun 1941. Pilihan tersebut dianggap paling tepat karena daerah asalnya juga merupakan basis Muhammadiyah.

Semenjak sekolah disana, Abdul Kahar Muzakkar mulai berkenalan dan bersentuhan dengan ide-ide pembaharuan yang dibawa oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah di sekolahnya. Selama menempuh pendidikan disana, ia sempat menjadi pemimpin lokal Hizbul Wathan (HW) yang merupakan gerakan kepanduan Muhammadiyah (Van Dijk, 1983:142).

Ketika menempuh pendidikan tersebut, dia mendapatkan seorang guru yang mempunyai kecintaan luar biasa terhadap ilmu dan Islam yang bernama Abdul Kahar Muzakkir. Selain seorang agamawan, dia juga seorang negarawan. Abdul Kahar Muzakkir inilah yang telah mencerahkan pemikirannya dan dialah orang yang dianggap telah menginspirasi La Domeng sehingga namanya dinisbatkan kepada gurunya menjadi Abdul Kahar Muzakkar (Mattulada dalam Syihabuddin, 2006:98).

Dalam perjalanan hidupnya di Solo, Abdul Kahar Muzakkar akhirnya bertemu dengan gadis pujaan hatinya, seorang gadis keturunan Belanda yang bernama Cory Van Stevanus dan ia menikah dengannya. Dikutip dari wawancara Cory Van Stevanus dalam Syihabuddin (2006:99) bahwa :

Dia berhasil dalam berkeluarga dan disegani karena dia seorang yang pemberani, tegas serta jujur. Pemberani, pantang mundur dan teguh pendirian, itulah sifat dan karakter Kahar Muzakkar yang diakui orang-orang terdekatnya. Saya Cory Van Stevanus, mempunyai kenangan tersendiri saat pertama kali Kahar Mengagumiku. Saya adalah wanita Indo Belanda adalah puteri kepala Pabrik gula Gondang Legi Klaten, Adnan Bernard Van Stevanus. Kami menikah pada tahun 1948 dan dikaruniai 6 orang anak. Kini saya tinggal bersama putera bungsu di Cinere, Jakarta Selatan. (Syihabuddin,2006:99).

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Surakarta, ia kembali ke daerah asalnya dan bekerja pada pemerintahan Jepang sebagai pegawai pemerintahan (*Nippon Dohobu*) di Makasar (Ujung Pandang). Namun tidak lama ia berada ditengah kelahirannya tersebut, ia mengalami bentrokan dengan kepala adat setempat yang dikarenakan Kahar Muzakkar terpengaruh oleh paham modernisme Islam yang dibawanya ketika sekolah di Jawa.

Menurut Van Dijk (1983:144), tidak terlalu diketahui mengapa Kahar Muzakkar sampai menimbulkan amarah para ketua adat disana. Tetapi informasi yang didapat bahwa Kahar muzakkar dituduh telah menghasut para ketua adat dan ia mengutuk sistem feodal yang berlaku di Sulawesi Selatan dan menganjurkan dihapuskannya aristokrasi. Sehingga dengan terjadinya bentrokan tersebut, maka Kahar Muzakkar tidak disukai oleh para ketua adat dan hukuman atas kerusuhan tersebut adalah dengan dibuang dari pulau kelahirannya atau diasingkan seumur hidup.

Dalam tayangan Tvone pada tanggal 18 Juni 2011, dikatakan bahwa Kerajaan Luwu merasa terhina oleh sikap dan perbuatan Kahar Muzakkar pada saat itu. Dan menurut Andaya dalam AL Chaidar (1420 H:134) menjelaskan bahwa pada tahun itu

Hadat atau Dewan yang memerintah dari Kerajaan Luwu menjatuhkan hukuman *Ripaopangitanan* kepada Kahar Muzakkar atas sikap dan perbuatannya. Secara harfiah kata *Ripaopangitanan* berarti "menurunkan seseorang atau sesuatu di tanah", atau dengan kata lain memperlakukan seorang bagaikan telah mati. Sehingga jika seseorang mendapatkan hukuman tersebut maka ia akan dibuang dan dianggap telah mati, dan ikatan dirinya dengan anggota masyarakat Bugis-Makasar yang lainnya dianggap terputus.

Atas dasar hukuman tersebut, maka Kahar Muzakkar terpaksa kembali ke Surakarta sekitar tahun 1943 dan memulai hidup baru disana. Di Surakarta ia menjadi seorang pedagang dengan membuka toko yang ia berinama "*Usaha Semangat Muda*". Dalam sumber lain diceritakan pula bahwa tidak beberapa lama Kahar Muzakkar tinggal di Surakarta, ia pun pindah ke Yogyakarta dan kembali belajar di Taman Siswa.

Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia di proklamirkan oleh Soekarno dan Hatta, Kahar Muzakkar pada saat itu sudah berada di Jakarta. Menurut Van Dijk, Kahar Muzakkar ikut turut serta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Karena pada saat itu ia bergabung dengan Pemuda Menteng 31 dan Barisan Pelopor. Dalam perjalanan perjuangannya itu Kahar Muzakkar merupakan salah seorang barisan pengawal Soekarno ketika Presiden Soekarno menyampaikan pidato di lapangan Merdeka Jakarta pada tanggal 19 September 1945.

Menjadi seorang pengawal Soekarno pada saat itu, Kahar Muzakkar sendiri menceritakan dalam bukunya yang dikutip Van Dijk (1983:144) bahwa ia merasa

bangga karena hanya dirinya satu-satunya orang yang pada saat itu bersenjatakan golok, yang siap melindungi Soekarno dan Mohammad Hatta dari serangan bayonet serdadu Jepang yang berusaha membubarkan pertemuan.

Sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Kahar Muzakkar terus aktif dalam organisasi pergerakan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ia menjadi salah seorang pendiri suatu organisasi pemuda dari Sulawesi yang berada di Jawa, yaitu Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi (GEPIS). Pada tanggal 21 Oktober 1945, GEPIS bergabung dengan suatu organisasi pemuda Sulawesi yang lain yaitu Angkatan Pemuda Indonesia Sulawesi (APIS). Dan kedua organisasi ini akhirnya melebur dan menghasilkan organisasi baru yang bernama Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS).

Dalam organisasi KRIS ini, Kahar Muzakkar diangkat menjadi sekretaris pertama KRIS sedangkan ketuanya adalah A. Ratulangi. Dalam kedudukannya sebagai sekretaris, Kahar Muzakkar ditugasi mendirikan cabang-cabang di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Alasan dibentuknya KRIS adalah bentuk pembelaan diri dari sebagian warga Sulawesi yang dianggap pro terhadap Belanda pada masa perang Dunia Kedua, sehingga dengan pembentukan KRIS dan ikut melawan Belanda adalah pembuktian masyarakat Sulawesi yang ada di Jawa bahwa mereka bersedia bertempur melawan Belanda dan berpihak pada Republik Indonesia (Syafaruddin Usman, 2010:14).

Setelah lepas dari organisasi KRIS, Kahar Muzakkar mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk Batalyon Kesatuan Indonesia (BKI) pada

akhir Desember 1945. Pasukan yang tergabung dalam Batalyon ini adalah para tahanan dari Nusakambangan Cilacap yang kemudian diberi latihan militer secara singkat dan dipersiapkan oleh Kahar Muzakkar untuk menjadi pengawal Presiden Soekarno pada waktu pemerintah Republik Indonesia pindah dari Jakarta ke Yogyakarta.

Perkembangan awalnya memang pasukan Batalyon Kesatuan Indonesia (BKI) ini ditugaskan sebagai pengawal Presiden Soekarno pada saat perpindahan tersebut, namun kemudian ada perubahan nama menjadi pasukan gerak cepat Penyelidikan Militer Khusus PMC yang dipimpin oleh Kolonel Zulkifli Lubis di Yogyakarta. Selanjutnya, Kahar Muzakkar aktif pula dalam mengatur penyusupan para pejuang dari Jawa ke Sulawesi dengan menggunakan perahu-perahu, dimana pada saat itu Belanda telah menegakan kembali kekuasaannya di Sulawesi. Dan pada tanggal 24 Maret 1946, Kahar Muzakkar mendapat kuasa penuh dari panglima Tentara Republik Indonesia yaitu Jenderal Sudirman untuk membentuk Tentara Republik Indonesia Persiapan di Sulawesi (TRIPS). Dan dalam upaya pembentukan pasukan tersebut, ia banyak mengambil pasukan dari BKI (Van Dijk, 1983:146).

Atas dasar kuasa tersebut maka penyusupan para gerilyawan dari Jawa ke Sulawesi semakin ditingkatkan. Pada mulanya semua berjalan dengan lancar dan hampir 1200 orang prajurit berhasil dikirimkan, namun pada akhirnya kegiatan penyusupan tersebut terhenti karena digagalkan oleh Westerling. Sehingga harapan pasukan Republik di Sulawesi sedikit suram. Sebagian besar pejuang yang datang dari Jawa tertangkap dan dibunuh dan sebagian lainnya kembali ke Jawa.

Dalam masa perjuangan ini nama dan kedudukan TRIPS/TRIPES beberapa kali mengalami perubahan. Pada bulan November, tidak lama setelah diadakannya Perjanjian Linggarjati, namanya berubah menjadi Lasykar Sulawesi. Bersamaan dengan itu, Kahar Muzakkar dan anak buahnya di Madiun membentuk pasukan penggempur sendiri yang bernama Barisan Berani mati (BBM). Pasukan BBM ini diambil dari pasukan terbaik TRIPS (Matulada dalam Van Dijk, 1983:148).

Sebagai lasykar, Lasykar Sulawesi diintegrasikan ke dalam Biro Perjuangan Kementerian Pertahanan dan selanjutnya menjadi Resimen Hasanuddin. Sehingga penggabungan ini mengandung arti bahwa kekuasaan atas Lasykar Sulawesi atau Resimen Hasanuddin pada pokoknya terletak pada Kementerian Pertahanan bukan pada Panglima Tentara Republik. Ketika pada bulan Juni 1947 Tentara Republik berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan semua Lasykar-Lasykar diwajibkan bergabung didalamnya sehingga secara otomatis Resimen Hasanuddin berubah menjadi Brigade II.X bersama dengan Lasykar-Lasykar lainnya dari pulau-pulau luar Jawa yang berjuang di Jawa.

Brigade II.X ini merupakan bagian dari KRU-X (Kesatuan Reserve Umum). Nasution menjelaskan bahwa ia sebagai Kepala Staf Operasi Tentara Indonesia menginginkan KRU-X menjadi suatu kesatuan yang terintegrasi dengan baik dari semua Lasykar seberang yang bergerak di Jawa. Pada mulanya rencana Nasution ini gagal karena adanya permusuhan antar para komandan-komandan Lasykar yang menyebabkan setiap daerah mempunyai Brigade masing-masing. Namun pada tahun

berikutnya usaha Nasution ini berhasil dan peleburan Lasykar-Lasykar tersebut melahirkan sebuah Brigade baru yaitu Brigade XVI.

Brigade XVI ini merupakan komponen yang terdiri dari Brigade II.X Kahar Muzakkar, dan Brigade I. X yang dipimpin oleh J.F Marouw. Selain itu J.F Warouw juga bertindak sebagai komandan Brigade XVI yang baru, dan Kahar Muzakkar sebagai orang kedua dalam pimpinan, sedangkan H.N. Vantje Sumual diangkat sebagai kepala Staf.

Setelah aksi militer Belanda yang kedua, terjadi pertentangan natar J.F Warouw dengan Kahar Muzakkar yang menyebabkan pasukannya terpisah. Kahar Muzakkar dan anak buahnya setelah beroperasi di Jawa Timur pergi ke Yogyakarta, sedangkan J.F. Warouw dan pasukannya tetap tinggal di Jawa Timur. Ketika di Jawa Tengah, Kahar Muzakkar kembali bertentangan dengan Komandannya, yaitu Kolonel Soeharto. Karena pertentangan tersebut maka Kahar Muzakkar ditegur dan diturunkan pangkatnya. Sampai pada tahun 1949 dengan kedudukannya sebagai Komandan Komando Grup Seberang ia kembali dinaikan pangkatnya menjadi Letnan Kolonel (Van Dijk, 1983:150).

4.2 LATAR BELAKANG GERAKAN DAN PEMIKIRAN POLITIK ABDUL KAHAR MUZAKKAR

4.2.1 Situasi dan Kondisi Politik Indonesia Tahun 1950an

Berbagai masalah kehidupan di Indonesia pasca revolusi tampak muncul kepermukaan di awal tahun 1950-an. Masalah yang pokok adalah bagaimana

seharusnya sebuah negara dikelola dan sistem apa yang cocok untuk Indonesia yang sangat beragam. Keberagaman itu bukan saja dari sisi etnis atau suku bangsa yang berdiam didalamnya, tetapi juga pada keberagaman pemikiran. Konsekuensi dari keberagaman tersebut adalah munculnya permasalahan diberbagai bidang kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi dan kestabilan jalannya roda pemerintahan negara.

Untuk beberapa dekade setelah revolusi, permasalahan tersebut telah menjadi hal rumit yang tidak mudah untuk dipecahkan. Kondisi alam revolusi tidak memberikan kesempatan kepada para pemimpin Indonesia untuk melakukan pembenahan terhadap kemungkinan-kemungkinan perbenturan pemikiran tersebut. Rentetan peristiwa antara tahun 1945-1949 dalam menghadapi gempuran Belanda baik di medan pertempuran maupun di meja perundingan, telah mengalihkan sebagian besar konsentrasi pemikiran para pemimpin itu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam bidang-bidang kehidupan tersebut. Akibatnya, tahun 1950-an lebih banyak diwarnai dengan perdebatan yang menjurus pada proses disintegrasi.

Menjelang berakhirnya tahun 1949, setidaknya terdapat tiga permasalahan politik yang muncul ke permukaan. Beberapa masalah tersebut adalah, *pertama*, pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tahun 1948, *kedua*, terbentuknya PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) *dan ketiga* terbentuknya Negara Indonesia Serikat (RIS). Permasalahan tersebut semakin bertambah kompleks dengan terbentuknya UUDS 1950-an yang berlaku kurang lebih 9 tahun yaitu antara tahun 1950-1959 (Marwati Djoened: 1993:205).

Permasalahan yang pertama yakni berkenaan dengan pemberontakan PKI. PKI yang pernah melakukan pemberontakan terhadap Belanda pada tahun 1927, pada tahun 1948 melakukan hal yang sama terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan itu dilakukan ketika bangsa Indonesia sedang berkonsentrasi menghadapi kekuatan Belanda dengan agresi militernya sehingga konsentrasi angkatan darat menjadi terpecah, selain harus melawan agresi Belanda, mereka pun harus menumpas pemberontakan PKI Madiun tersebut. Pengkhianatan PKI itu bagi masyarakat Indonesia tidak mudah untuk di maafkan (Dinas Sedjarah Angkatan Darat, 1985:148).

Belum tuntas masalah PKI, pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi militernya yang kedua, dalam hal ini Belanda berhasil menguasai ibu kota Republik Indonesia yaitu Yogyakarta, dan menangkap beberapa pemimpin Indonesia termasuk Presiden dan wakil Presiden, Soekarno dan Hatta. Akibatnya roda pemerintahan beralih ke Sumatera di bawah pimpinan Mr. Syafrudin Prawiranegara yang sebelumnya menjabat sebagai menteri kemakmuran. Inilah masalah yang kedua, yakni dengan mandat dari presiden tersebut, Syafrudin membentuk PDRI yakni Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera dan memproklamirkannya pada tanggal 22 Desember 1948. Syafrudin tampil sebagai ketua, PDRI berpusat di Bidar Solok, Sumatera Barat (Ricklefs, 2004:204).

Dengan bantuan pihak Internasional lewat KMB, maka Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia, namun hasil konferensi tersebut Indonesia harus mengubah Negara kesatuan republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat.

Inilah permasalahan yang bisa dikatakan membawa pengaruh terhadap situasi Indonesia pada tahun 1950-an.

Selain situasi dan kondisi tersebut, masalah yang tak kalah pentingnya yang ikut mewarnai suasana perpolitikan di Indonesia pada saat itu adalah masalah *rasionalisasi* dan *reorganisasi* satuan-satuan angkatan Darat (AD) atau biasa disingkat RARE. Dalam RARE ini dilakukan penciutan, pemutasian para perwira dan penghapusan kesatuan-kesatuan, seperti penghapusan kesatuan Benteng yang terdiri atas empat Batalion. Brigade ini kemudian dicituk menjadi satu Resimen yakni Resimen IV Sumatera.

Memasuki tahun 1950, permasalahan semakin menjadi kompleks, dimana terjadi perubahan Undang-Undang dasar dengan lahirnya Undang-Undang sementara 1950. Perubahan itu juga membawa dampak pada perubahan sistem penyelenggaraan negara, yakni dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Perubahan sistem penyelenggaraan negara ini pada waktu-waktu selanjutnya sangat besar dampaknya terhadap kelangsungan pemerintahan negara dan perebutan pengaruh-pengaruh elit-elit politik (Dinas Sejarah Angkatan Darat, 1972:217).

4.2.2 Sulawesi Selatan Tahun 1950an

Di Sulawesi Selatan, menurut Barbara Sillar Harvey (1989: 104) gerakan nasionalis cenderung terlihat tidak siap untuk memproklamkan kemerdekaan Indonesia jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya seperti Jawa dan Sumatera. Sedangkan Sekutu dan pejabat Belanda pada saat itu terlihat sangat siap

untuk memegang kekuasaannya kembali di Sulawesi. Usaha kaum nasionalis untuk menegakan kekuasaan Republik Indonesia yang baru diproklamasikan itu, sedikit terhambat akibat lemahnya gerakan kaum nasionalis di daerah ini. Jumlah kaum nasionalis hanya sedikit dan mereka terpecah belah.

Ketika Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, delegasi Sulawesi untuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sedang berada di Jakarta. Sehingga para nasionalis lain yang ada di Sulawesi, tidak berani untuk mengambil tindakan sebelum mereka kembali. Karena komunikasi mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia pada saat itu sangat sulit masuk ke Sulawesi.

Sulawesi Selatan selama revolusi fisik tahun 1945-1949 merupakan salah satu daerah penting karena menjadi tempat perlawanan paling hebat di luar Republik yang menentang pengembalian kekuasaan Belanda di Indonesia. Selain itu, Sulawesi Selatan pun menjadi markas besar yang paling berkembang di antara negara-negara federal yang disponsori Belanda, yaitu Negara Indonesia Timur (NIT) (Barbara Sillar Harvey, 1989:106).

Kehebatan perlawanan pro-Republik di Sulawesi Selatan tidak diduga oleh pihak Belanda, dan ternyata sangat membahayakan mereka dalam melaksanakan rencananya yaitu mencoba suatu hubungan baru dengan masyarakat Sulawesi. Hubungan baru ini diusulkan oleh pemerintahan Belanda yaitu Letnan Gubernur Jenderal Van Mook supaya dibentuk suatu negara federal Indonesia, dalam suatu persemaikmuran dengan kerajaan Belanda. Sekalipun usul ini pada hakikatnya tidak

dapat diterima oleh Republik, karena dianggap sebagai kelanjutan dari kebijaksanaan lama berupa "*memecah belah dan menguasai*". Namun, usulan tersebut dipakai oleh tokoh nasionalis Indonesia sebagai dasar perundingan dan menghasilkan perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947.

Pemerintah Belanda tidak ingin menunggu lama tercapainya persetujuan ini, tetapi langsung meneruskan rencananya sendiri membentuk negara federal Indonesia Timur yang dipilih sebagai daerah tempat negara bagian pertama yang akan dibentuk. Karena kekuatan militer Belanda sangat kuat di daerah ini, yang meliputi Ambon dan Minahasa yang merupakan sumber pengerahan tenaga utama untuk KNIL. Dan Belanda cukup pintar dalam menilai gagasan negara federal ini akan menjadi daya tarik bagi rakyat di luar pulau Jawa yang jumlahnya jauh lebih besar.

Negara Indonesia Timur (NIT) adalah unit pertama dari unit-unit yang disponsori Belanda untuk mendirikan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang direncanakan. Dan merupakan negara bagian yang paling berkembang dan paling otonom diantara unit-unit ini.

Untuk mendirikan NIT mula-mula Belanda harus menghapuskan perlawanan-perlawanan pro-Republik di Sulawesi Selatan, yang merupakan daerah paling banyak di Indonesia Timur dan Ibu kotanya yaitu Makasar. Belanda mencoba mencari dan memberikan keuntungan, sehingga sekitar November 1945 berhasil meyakinkan Nadjamoeddin Daeng Malewa untuk menerima kedudukan sebagai konsultan komersial bagi NICA.

Persaingan dikalangan aristokrasi juga digunakan Belanda untuk mendapatkan kerjasama dengan sejumlah bangsawan terkemuka. Bagi beberapa orang tawaran kedudukan dalam *Hadat tinggi* dan dewan-dewan Raja yang merupakan badan utama yang digunakan oleh Belanda sebagai saluran untuk melaksanakan kekuasaan mereka di Sulawesi Selatan. Dan hal ini merupakan perangsang yang cukup kuat (Barbara Sillar Harvey, 1989: 105).

Dengan berbagai rencana dan tipu muslihat Belanda, maka banyak para bangsawan yang akhirnya bekerja sama dengan Belanda dan terjadinya perpecahan diantara mereka. Banyaknya para bangsawan yang pro-Belanda dan setuju dengan ide dibentuknya Negara Indoensia Timur, maka pada awal Desember 1946 para delegasi dari Indoensia Timur berkumpul di Denpasar untuk mendirikan NIT.

Diskusi mengenai pembentukan NIT ini dimulai dalam konferensi Malino, tanggal 15-25 Juli 1946, dilanjutkan dengan konferensi Pangkalpinang, tanggal 8-9 Oktober 1946, dan puncaknya pada tanggal 24 Desember 1946 dalam konferensi Denpasar dengan diprolamasikannya Negara Indonesia Timur.

Seiring dengan dibentuknya Negara Indonesia Timur, maka perlu adanya presiden NIT. Pada saat itu ada tiga calon untuk jabatan presiden NIT, yaitu : Anak Agung Gde Sukowati, yang merupakan seorang bangsawan Bali berpendidikan baik dan menyetujui bentuk pemerintahan federal demi kepentingan otonomi daerah. Selanjutnya yaitu Tadjuddin Noor, orang bugis dari Kalimantan yang merupakan seorang nasionalis yang aktif di Makasar sejak tahun 1944. Dan Nadjamoeddin Daeng Malewa adalah seorang nasionalis Makasar yang tidak pernah membiarkan

prinsip-prinsipnya menghalangi kesempatannya. Pada pemungutan suara, Sukowati mendapat mayoritas suara yang diperlukan dan ia kemudian menunjuk Nadjamoeddin untuk menjadi formantir kabinet. Kabinet NIT pertama yang dikepalai oleh Nadjamoeddin sebagai perdana menteri merangkap menteri urusan perekonomian, dilantik di Jakarta pada tanggal 31 Januari 1947 (Barbara Sillar Harvey 129).

Sehingga sejak dibentuknya NIT pada tahun 1947 sampai 1949 Sulawesi Selatan dan daerah sekitarnya berada dalam cengkraman Belanda sehingga kondisi seperti itu menyulitkan rakyat yang pro-Republik untuk bergerak melawan Belanda. Melihat kondisi seperti itu, tokoh nasionalis di Jawa khususnya yang berasal dari Sulawesi berusaha untuk membentuk pasukan dan mengirimkannya ke Sulawesi yang diharapkan dapat membantu perjuangan melawan Belanda. Maka dari sinilah dimulainya ekspedisi-ekspedisi pengiriman pasukan dari Jawa ke Sulawesi.

4.2.3 Ekspedisi Gerilyawan dari Jawa ke Sulawesi Selatan

Ketika perang kemerdekaan telah usai, masalah baru harus dihadapi oleh pemerintah Republik Indonesia. Masalah yang dimaksud adalah apa yang dikenal dengan masalah gerilya. Sebenarnya masalah penyelesaian gerilya ini terjadi hampir diseluruh provinsi yang telah dibentuk pada saat itu. Namun, berbeda dengan masalah gerilya di Sulawesi Selatan yang berkembang semakin rumit, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya.

Yang dimaksud gerilyawan-gerilyawan ini adalah pasukan-pasukan yang dikirim dari Jawa ke Sulawesi Selatan pada masa revolusi. Hal ini dilakukan karena

melihat posisi Sekutu atau Belanda yang semakin kuat di daerah ini. Pemerintah pada saat itu menyadari kurangnya fasilitas perlawanan terhadap Belanda di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu diantara pemimpin perlawanan di Sulawesi Selatan merencanakan untuk meminta bantuan dari Jawa. Dan beberapa rombongan segera diberangkatkan ke Jawa untuk rencana tersebut (Anhar Gonggong, 1990:180).

Dilain waktu, sebelum rombongan dari Sulawesi Selatan tiba dan meminta bantuan ke Jawa, pasukan di Jawa sebenarnya telah mempersiapkan pasukan yang memang disiapkan untuk membantu perlawanan rakyat Sulawesi menghadapi Belanda. Pasukan ini sebenarnya memang merupakan anak daerah Sulawesi Selatan sendiri yang berjuang di Jawa. Pasukan-pasukan tersebut antara lain pasukan di Surabaya yang telah mengorganisasikan pasukannya menjadi BKR-Laut Surabaya, di Jakarta yang dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakkar yang ia juga sebagai sekretaris KRIS telah mempersiapkan pasukan tempur yang anggota-anggotanya merupakan bekas tahanan dari Nusakambangan. Sedangkan untuk daerah Semarang dan Cirebon telah dibentuk BKR-Laut kelasykaran KRIS yang dipimpin oleh Andi Penyamin, Bebasa Daeng Lalo dan Her Tasning. (Anhar Gonggong,1990:181).

Ketika rombongan Andi Mattalatta dan Saleh Lahade sampai di Jawa, dan bertemu dengan Presiden Soekarno untuk melaporkan situasi perlawanan di Sulawesi Selatan, presiden menyarankan untuk menemui perdana menteri Syahrir dan panglima Besar Sudirman. Dalam pertemuan bersama Syahrir dan Sudirman itulah maka terjadi hubungan dengan Abdul akhar Muzakkar yang pada saat itu

berkedudukan sebagai komandan Batalyon kemajuan Indonesia yang berada dibawah komando Brigade pendidikan Intel pimpinan Zulkifli Lubis.

Setelah beberapa pertemuan dan perbincangan mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh guna memperkuat perlawanan di Sulawesi Selatan, maka Andi Mattalatta dan Abdul Kahar Muzakkar mengusulkan kepada panglima Besar Sudirman agar membentuk Tentara Republik Indonesia (TRI) Persiapan Sulawesi Selatan untuk diberangkatkan ke Sulawesi.

Usulan tersebut diterima panglima Besar Sudirman, bahkan rencana ini menjadi suatu agenda dari Markas Besar Tentara. Dengan diterimanya usulan tersebut maka pada 16 April 1946 dikeluarkan sebuah keputusan Panglima Besar Sudirman yang menugaskan Abdul Kahar Muzakkar, Andi Mattalatta dan Saleh Lahade untuk (Anhar Gonggong,1990:183):

1. Melakukan persiapan dalam pembentukan kader dan pasukan lengkap dengan peralatan tentara yang akan diberangkatkan secara ekspedisi ke Sulawesi.
2. Membentuk Tentara Republik Indonesia (TRI) di Sulawesi Selatan dengan kekuatan dan organisasi satu divisi, hingga satuan yang terkecil, guna menegakan dan membela republik Indonesia.
3. Menyampaikan laporan hasil tugasnya kepada Panglima Besar.

Berdasarkan surat keputusan Panglima Besar tersebut, maka diadakanlah reorganisasi kekuatan-kekuatan bersenjata diantara pejuang-pejuang yang berasal dari Sulawesi Selatan. Dan struktur organisasi dari TRI-Persiapan diciptakan bersama susunan personalia pimpinan TRI-Persiapan Sulawesi ini ialah Abdul Kahar Muzakkar sebagai Komandan berpangkat Kolonel, Andi Mattalatta sebagai wakil Komandan dan Saleh Lahade sebagai kepala Staf. Dan direncanakan akan segera

mengirim pasukan ke Sulawesi Selatan dengan terlebih dahulu dilatih kemiliteran di Yogyakarta.

Ekspedisi pertama yang diberangkatkan ke Sulawesi selatan ialah yang dipimpin oleh Muhammadong, berangkat dari Situbondo tanggal 27 Juni 1946, namun rombongan ini gagal sampai di Sulawesi Selatan karena tertangkap di perairan Bali. Namun ekspedisi berikutnya berhasil mendarat baik di pantai ataupun dipedalaman Sulawesi Selatan. Ekpedisi pasukan dari Jawa ke Sulawesi Selatan ini berlangsung dari Juni 1946 sampai Maret 1947.

Kedatangan pasukan ekspedisi dari Jawa ke Sulawesi Selatan ini sangat membantu dalam memperkuat pasukan-pasukan kelayakaran yang sudah ada di Sulawesi Selatan. Namun, ketika pasukan dari Jawa belum tiba dan masih mempersiapkan ekspedisi, organisasi-organisasi kelayakaran yang telah ada di Sulawesi Selatan pun berusaha mempersiapkan dan menyusun kekuatan secara lebih baik. Inisiatif ini datang dari pimpinan Kris Muda Mandar , Riri Amin Daud bersama dengan pimpinan PPNI. Dan pada tanggal 17 Juli diadakan suatu konferensi di Rannayana-Janeponto yang dihadiri oleh 19 kelayakaran yang ada di Sulawesi Selatan. Konferensi ini berhasil mempersatukan diri dalam satu organisasi yaitu Lasykar Pemberontak Republik Indonesia Sulawesi (LAPRIS) (Anhar Gonggong, 1990: 187).

Kepemimpinana organisasi ini dipimpin oleh tokoh-tokoh perjuangan, seperti Karaeng Jarung, Ranggeng Adeng Romo yang masing-masing dipilih sebagai ketua umum dan komandan ketentaraan pasukan pertempuran dan sekretaris Jenderal.

Sebagai suatu satuan organisasi kelasykaran, LAPRIS sangat aktif dalam latihan-latihan untuk meningkatkan perlawanan terhadap Belanda.

Ditengah-tengah meningkatnya perlawana dari Belanda terhadap LAPRIS, Andi Mattalatta dan Saleh Lahade tiba di Sulawesi Selatan dan langsung menyusun rencana untuk membentuk suatu pasukan yang terorganisir secara militer dan mereka berusaha untuk melakukan suatu pertemuan dengan pemimpin-pemimpin organisasi kelasykaran yang ada pada waktu itu. Maka diadakanlah konferensi Patjetjekke yang berhasil menyusun struktur dan personalia suatu Divisi TRI di Sulawesi Selatan/Tenggara atau Divisi Hasanuddin yang terdiri dari (Anhar Gonggong,1980:186):

Panglima Divisi	: Andi Abdullah Abu Massepe
Kepala Staf	: Mayor Andi Mattalatta
Wakil Kepala Staf	: Mayor Saleh Lahade
Seksi I	: Kapten Muhammadjsah
Seksi II	: Kapten Maulwi Saelan
Seksi III	: Kapten Andi Sapada
Seksi IV	: Kapten Andi Oddang

Dalam Konferensi atau pertemuan itu pula dibentuk tiga Resimen yang masing-masing mempunyai daerah operasi yang dibawahinya ketiga Resimen itu adalah :

1. Resimen I, mempunyai daerah kekuasaan Pare-Pare, Mandar, dan Komandan Resimennya Andi Selle Mattola.
2. Resimen II, mempunyai daerah kekuasaan Kota Makassar dan daerah-daerah sebelah selatan, dengan Komandan Resimennya Andi padjonga.
3. Resimen III, mempunyai daerah kekuasaan sebelah Tenggara denagn Komandan Resimennya Andi Djemma.

Dari struktur dan daerah kekuasaan yang telah terbentuk, dapat dilihat bahwa ada dua usaha untuk memperkuat perlawanan rakyat di Sulawesi Selatan yang dilakukan melalui pertemuan atau konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil organisasi pejuang yang ada pada waktu itu. Pertemuan tersebut juga melahirkan organisasi baru yaitu organisasi kelasykaran dengan nama LAPRIS dan yang lainnya Divisi TRI Sulawesi Selatan/Tenggara. Walaupun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu LAPRIS dibentuk oleh kesepakatan para pemimpin-pemimpin lasykar-lasykar tanpa suatu intruksi secara militer, melainkan atas kesadaran untuk mempersatukan kekuatan organisasi kelasykaran sebagai alat perlawanan rakyat terhadap Belanda.

Sedangkan Divisi TRI Sulawesi Selatan tidak hanya dibentuk atas prakarsa pemimpin-pemimpin lasykar yang hadir pada waktu itu saja, melainkan juga dilakukan atas suatu surat perintah penugasan dari Markas Besar Tentara, yaitu Panglima Besar Jenderal Soedirman.

TRI-Persiapan Divisi Hasanuddin di Sulawesi Selatan ini rupanya terus ada sampai masa reorganisasi Angkatan Darat tahun 1948. Dan para pemuda dari Sulawesi Selatan yang ada di Jawa selama tahun 1947 sampai awal tahun 1948 kebanyakan bergabung dalam batalyon-batalyon TRI dibawah Andi Mattalatta.

Sebenarnya dalam tubuh TRI Divisi Hasanuddin terdapat dua organisasi yang sangat berbeda, kelompok atau organisasi yang pertama ialah kelompok yang merupakan inti dari TRI Hasanuddin yaitu anggota-anggota BKI-nya Abdul Kahar Muzakkar yaitu narapidana yang dibebaskan dari Nusa Kambangan. Beberapa

diantaranya mungkin merupakan tahanan politik dan beberapa lagi adalah para penjahat atau bandit biasa. Sehingga sebagian kelompok dari mereka sangat pandai bertempur, tak kenal takut namun sedikit sulit untuk diatur dan dikendalikan. Bahkan banyak dari mereka yang buta huruf karena mereka tidak berpendidikan sama sekali. Namun sebagian lagi merupakan kelompok terpelajar atau pemuda seperti Saleh Lahade dan Andi Mattalatta yang pada umumnya berpendidikan baik (Barbara Sillar Harvey, 1989:144).

Sehingga dari perbedaan latar belakang dan tingkat pendidikannya tersebut, maka pantaslah jika terjadi permasalahan antara gerilyawan-gerilyawan Sulawesi Selatan pada kurun waktu selanjutnya. Jika membandingkan antara Saleh Lahade, Andi Mattalatta dan Abdul Kahar Muzakkar, memang akan terlihat perbedaan yang dominan apalagi dilihat dari tingkat pendidikan dan karakter diri.

Saleh Lahade dan Andi mattalatta keduanya berasal dari Baru anak seorang guru. Saleh sekolah di AMS atau sekolah menengah Belanda dan melanjutkan sekolah ke sekolah tinggi pertanian di Bogor, ia mempunyai bakat berpikir akademis dan terkenal dengan analisa politiknya. Sedangkan Andi Mattalata merupakan pemuda yang aktif, ia seorang atlet dan pejuang yang berasal dari kaum bangsawan. Sedangkan Abdul Kahar Muzakkar hanya berasal dari keluarga tani rendah di Luwu, bersekolah di Muhammadiyah Solo. Ketika masa Revolusi ia membentuk organisasi yang bernama Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi (GEPIS) yang kemudian melebur menjadi KRIS sedangkan pasukan khususnya adalah BKI yang merupakan eks Nusa Kambangan. Kahar Muzakkar tidak kenal takut, nekat dan susah diatur.

Hubungan Kahar dan anak buahnya tampaknya merupakan prototip cinta hubungan bapak dan anak buah. Sekalipun ia menghabiskan waktu di markas Besar militer di Yogyakarta, Kahar sering kali mengunjungi satuan-satuan TRI di front. Ia mempertahankan kewibawaan atas mereka, dan kesetian mereka kepadanya, sekalipun mereka tidak berpendidikan militer formal. Sesuai dengan pendapat Barbara Sillar harvey (1989:146) bahwa itulah Kahar Muzakkar, mempunyai kualitas pribadi kepemimpinan yang aneh yang tidak dapat diajarkan.

4.2.4. Masalah Kesatuan Gerilyawan Sulawesi Selatan (KGSS) dan Kekecewaan

Abdul Kahar Muzakkar

Pada saat pembentukan TRI Divisi Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Abdul Kahar Muzakkar merupakan sorang Komandan yang menguasai pasukan-pasukan bersenjata dari satuan tersebut. Tetapi, pendidikan dan pengalamannya tidak mempersiapkan dirinya untuk dapat bergaul dengan elite pemerintahan dan cendikiawan dari Republik di Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan Saleh Lahade dan Andi Mattalatta, Kahar jelas kalah dalam hal ini. Dan seiring dengan perjalanan revolusi ternyata veteran dan pasukan KNIL lebih mendominasi Angkatan Darat dibanding para lasykar-lasykar rakyat dan badan perjuangan yang dianggap kurang jelas (Anhar Gonggong, 1990: 193).

Kedudukan Abdul Kahar Muzakkar sendiri dalam Biro Perjuangan terancam oleh rencana reorganisasi dan Rasionalisasi tentara pada tahun 1948, suatu rencana

dalam tubuh Angkatan Darat yang pelaksanaannya akan berakibat jauh diseluruh Indonesia. Dengan mengesampingkan implikasi lebih besar dari rencana itu untuk membubarkan atau mempersatukan semua satuan bersenjata nonreguler kedalam tubuh TNI, pengaruhnya terhadap TRI-Persiapan ialah mengintensifikasi antagonisme hakiki antara kedua kelompok dalam barisannya (Barbara Sillar Harvey, 1989:177).

Dari bulan Mei sampai September, Staf Umum Angkatan Darat melakukan perundingan dengan kepala Biro perjuangan, Mayor Jenderal Djokosujono mengenai rencana pemerintah Hatta tentang reorganisasi Angkatan Darat. Sebagai langkah pendahuluan, satuan-satuan yang terdiri dari orang-orang yang berasal dari luar Republik (dalam hal ini yang berasal dari manapun kecuali Jawa dan Sumatera) yang dikenal sebagai *Lasykar Seberang*, akan dijadikan satu kesatuan yang diberinama Kesatrian Reserve-X (KRU-X), yang didalamnya terdiri dari TRI-Persiapan, KRIS, ARLI Divisi VI dan termasuk diantaranya pasukan-pasukan yang terkait.

Pada awal September KRU-X kemudian dimasukan kedalam TNI, sebagai Brigade XVI. Brigade XVI ini berisi orang-orang yang kembali dari Jawa ke daerahnya untuk berjuang melawan Belanda di Sulawesi. Dan memang beberapa orang dari Brigade XVI memang kembali ke Sulawesi Selatan tahun 1948 dan 1949.

Letnan Kolonel lembong, ditunjuk sebagai Komandan pasukan gabungan ini. Ia seorang perwira Manado dan ia adalah seorang anggota KNIL yang berperang dengan Sekutu melawan Jepang pada masa Perang Dunia II. Dan ketika kembali ke Indonesia ia menjadi seorang NEFIS. Sebagai kepala Stafnya, maka ditunjuklah

Letnan Kolonelo J.F Warouw seorang Minahasa yang mengepalai ALRI Divisi VI di Jawa Timur. Penunjukan Lembong sebagai Komandan tidak bisa diterima oleh Abdul Akhar Muzakkar dan anak buahnya (Barbara Sillar Harvey,1989:148).

Betapun tingginya keterampilan militer Lembong, ia adalah orang yang tidak dikenal dan tidak terpercaya, Sulawesi membutuhkan *Bapak* yang mereka percayai dan tidak boleh seorang asing yang meragukan. Dan akhirnya Lembong dipindah tugaskan menjadi Staf Markas Besar Angkatan Darat, dan ketika terjadinya pertempuran APRA di Bandung, Lembong terbunuh. Pasukan-pasukan Brigade XVI memilih Warouw Kolonel sebagai Komandan dan Kahar Muzakkar sebagai wakil Komandan, sedangkan Mayor H.N Ventje Sumual dijadikan kepala Staf.

Ketika usulan untuk pembentukan Brigade XVI ini diputuskan, tiba-tiba pada tanggal 18 Desember 1948 Belanda menyerang Ibu Kota Republik yaitu Yogyakarta. Dan satuan-satuan yang seharusnya digabungkan dalam Brigade XVI tersebut akhirnya terpisah jauh dalam pertempuran. Warouw yang ada di Jawa Timur bertempur di Gunung Kawi, di daerah Yogyakarta. Kahar Muzakkar memegang Komando atas sisa Brigade XVI yaitu Batalyon-Batalyon dibawah Mayor Andi matalatta dan Mayor Pelupessy. Sumual, bekas kepala Staf Kahar, dijadikan Komando sektor Yogyakarta Barat dibawah Kolonel Soeharto. Dan yang lainnya membawa pasukan disekitar Malang (Barbara Sillar Harvey, 1989:147).

Setelah pertempuran tersebut berakhir, perhatian Abdul Kahar Muzakkar tertuju kepada kemungkinan membangkitkan kembali kegiatan gerilya di Sulawesi Selatan yang sempat tertunda dan memperkirakan ke arah penunjukan dirinya sebagai

komandan militer Sulawesi Selatan (Barbara Sillar Harvey, 1989: 149). Untuk rencananya ini, ia mengirimkan Saleh Sahban ke Sulawesi selatan untuk mengadakan kontak dengan para pejuang gerilya Pro-Republik disana, dan menginformasikan kepada mereka mengenai peristiwa-peristiwa di Jawa dan mengobarkan semangat kembali semangat juang mereka. Tapi baru pada akhir tahun 1949 Kahar secara resmi diberikan mandat untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Dan hal ini sejalan dengan pandangan Nasution bahwa tugas Brigade XVI adalah mengembalikan pasukan-pasukannya ke wilayah asalnya untuk melawan Belanda di daerah masing-masing (Barbara Sillar Harvey, 1989:149).

Menurut Kahar dalam Barbara Sillar Harvey (1989:149), pada tanggal 17 Oktober 1949 ia diperintahkan oleh Kolonel Bambang Supeno, yang pada saat itu sebagai Kepala Staf Teritorial untuk Jawa, untuk membentuk Komando Grup Seberang (KGS) yang akan mengirim orang-orang dari Kalimantan dan Indonesia Timur, dengan tujuan mengoordinasikan kegiatan gerilya di daerah-daerah ini dan mempersiapkan kekuatan teritorial.

Namun, perintah Bambang Supeno ini tidak berlaku lagi, ketika Bambang Supeno berada dipihak yang kalah dalam perbedaan pandangan dikalangan Angkatan bersenjata mengenai watak dan peranan TNI. Sebagai seorang PETA lama, Bambang Supeno berada dipihak orang-orang yang menekankan pentingnya semangat revolusioner dan hubungan yang erat dengan rakyat, sedangkan Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Nasution memimpin orang-orang yang

berpendapat bahwa Angkatan Darat harus terdiri dari orang-orang yang cakap secara teknis, profesional dan harus diorganisasikan atas dasar hierarki yang jelas.

Perbedaan pandangan ini mempunyai arti penting sekali menjelang akhirnya pertempuran. Dalam masa damai, Republik tidak akan memerlukan ataupun tidak bisa membiayai suatu pasukan yang jumlahnya demikian meningkat selama revolusi. Dan menurut ketentuan Persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang ditandatangani di Den Haag tanggal 2 November 1949, bahwa para anggota KNIL yang ingin menggabungkan diri dengan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), harus dipenuhi kehendaknya.

Dengan demikian, suatu program reorganisasi dan rasionalisasi akan benar-benar terjadi dan persaingan antara anggota KNIL dan PETA beserta para lasykar-lasykar akan semakin menimbulkan masalah besar dalam tubuh TNI sendiri. Ditambah lagi pada saat itu Panglima Sudirman sedang sakit keras, sehingga keputusan mengenai siapa yang akan dipertahankan dan yang akan dimobilisasi berada ditangan profesional militer dan kementerian pertahanan.

Bersamaan dengan itu, ditengah-tengah usaha penyelesaian perang kemerdekaan dalam menghadapi Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB), maka pada bulan April 1949 Letnan Kolonel Abdul Kahar Muzakkar mengambil inisiatif melakukan reorganisasi kelasykaran pejuang gerilya di Sulawesi Selatan yang cukup banyak jumlahnya. Untuk melaksanakan rencananya itu, Kahar Muzakar yang pada saat itu bertindak sebagai komandan *Group Seberang*, menugaskan salah

seorang staf kepercayaannya yaitu Letnan satu Saleh Sahban untuk mempersiapkan segalanya (Anhar Gonggong, 1990: 193).

Maka pada bulan Agustus 1949, diadakan suatu konferensi para komandan-komandan kelasykaran yang diadakan di Maros, dan terbentuklah suatu Kesatuan Gerilyawan Sulawesi Selatan (KGSS). Organisasi baru kelasykaran ini, diperkirakan memiliki kekuatan sebanyak 10 Bataliyon.

Didalam konferensi Maros, KGSS mengusulkan kepada pemerintahan Republik Indonesia, agar KGSS dilebur kedalam Divisi Hasanuddin dan menetapkan Kahar Muzakkar sebagai Komandan Divisi. Alasan yang digunakan oleh para pembentuk KGSS untuk membentuk divisi Hasanuddin dan mengajukan Letnan Kolonel Abdul Kahar Muzakkar sebagai komandannya adalah karena ia dianggap berjasa dalam melakukan perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang dilakukannya dengan pengaturan dari Jawa. Bahkan pengangkatan itu dikaitkan dengan kemauan dari masyarakat Sulawesi Selatan (Anhar Gonggong, 1990:193-194)..

Menanggapi hal tersebut, komisi militer tidak bisa berbuat banyak, karena komisi telah mendapat perintah untuk menyaring para gerilyawan orang per orang untuk seleksi masuk TNI/APRIS, dan tidak mengakui atau menerima satuan-satuan secara keseluruhan. Standar pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kesegaran Jasmani dan lain-lain, harus menjadi acuan komisi untuk dapat meloloskan mereka menjadi anggota TNI/APRIS.

Dan dalam kenyataannya bahwa usulan inilah yang sebenarnya menjadi permasalahan gerilyawan di Sulawesi Selatan dan berkembang menjadi pertentangan antara KGSS dan pemerintah/Komandan Komando Teritorium VII Wirabuana, karena kedua belah pihak tidak bisa mempertemukan keinginan masing-masing (Anhar Gonggong, 1990: 194).

Pihak komandan KGSS yang pada saat itu diwakili oleh Letnan Satu Saleh Sahban yang juga sebagai koordinator KGSS mengusulkan agar penerimaan KGSS masuk kedalam APRIS dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Artinya semua anggota KGSS diterima dalam APRIS tanpa dilakukan penyaringan tanpa mempersoalkan persyaratan-persyaratan. Dan hal ini tidak bisa diterima oleh Komandan Komando TT VII Wirabuana, karena penerimaan anggota KGSS itu perbatalyon sebab bagaimanapun persyaratan-persyaratan tersebut tetap diperlukan.

Pertentangan yang didasari oleh sikap yang berbeda itu tampaknya berkepanjangan. Untuk mencari jalan penyelesain masalah gerilya ini, maka Abdul Kahar Muzakkar sebagai pengambil inisiatif reorganisasi dan pembentuk KGSS meminta kepada Panglima APRIS untuk dikirimkan ke daerah Sulawesi yang sedang bergejolak tersebut. Apalagi baru saja terjadi pemberontakan yang dilakukan kapten KNIL Andi Aziz. Dikirimnya Kahar Muzakkar ke Sulawesi Selatan bertujuan untuk mencari pendekatan penyelesaian dengan gerilya, bukan untuk mendapatkan perbedaan pendapat (Van Dijk, 1983: 156).

Letkol Abdul Kahar Muzakkar berangkat ke Sulawesi Selatan bersama Letkol Mursito, dan langsung mengadakan perjalanan ke daerah-daerah pedalaman untuk

menemui dan meminta keterangan dari para komandan-komandan Batalyon KGSS dan para anak buah mereka yang bagi Abdul akhar Muzakkar mereka tidaklah asing lagi karena mereka adalah bekas anak buahnya ketika di Jawa Timur dan di Yogyakarta.

Dan hasil dari perbincangannya tersebut, Kahar melapor kepada Kolonel Kawilarang sebagai Panglima TT VII Wirabuana. Tetapi laporan dari Kahar tidak ditanggapi positif oleh Kolonel Kawilarang. Bahkan sebaliknya, dalam rapat yang dihadiri oleh Abdul Kahar Muzakkar pada tanggal 1 Juli 1950 itu, Kolonel Kawilarang mengeluarkan suatu dekrit yang menyatakan pembubaran KGSS sebagai organisasi kelasykaran gerilya (Anhar Gonggong, 1990:197).

Inti dari dekrit yang terkenal dengan sebutan *Decreet Kawilarang* ini menyebutkan bahwa "KGSS dan organisasi diluar APRIS dianggap telah bubar dan segala usaha untuk melanjutkan dan menghidupkan organisasi tersebut termasuk larangan Tentara "(Anhar gonggong, 1990:197). Menanggapi isi dekrit Kawilarang tersebut, Kahar Muzakkar pada saat itu juga (didalam ruang rapat) Ia membuka dan meletakkan pangkat Letkolnya dan itu menandakan sejak saat itu ia keluar dari APRIS.

Beberapa hari kemudian Kahar Muzakkar dikabarkan masuk hutan, hal ini mengindikasikan bahwa ia memihak kepada KGSS, tetapi menurut sumber-sumber lain seperti menurut Barbara Sillar Harvey (1989:175) dan menurut Van Dijk (1983:157) bahwa Kahar Muzakkar diculik oleh anggota KGSS atas usulan Andi Sose, walaupun mungkin sekali Andi Sose bertindak seperti itu atas perintah atau setidak-tidaknya dengan persetujuan Akhar Muzakkar sendiri.

Tiardjono dalam Van Dijk (1983:158), mengemukakan bahwa tindakan Kahar Muzakkar masuk hutan adalah suatu bentuk usaha Kahar untuk meyakinkan teman-temannya atau anggota KGSS untuk mau bergabung dengan Tentara Republik Indonesia, namun disisi lain Tentara malah memperlihatkan sikap-sikap yang akan menghancurkan KGSS, disinilah menurut Tiardjono sebagai alasan kekecewaan dan amarah Kahar Muzakkar dengan melepaskan tanda Letkolnya kepada Kawilarang.

Sebuah dokumen yang diterbitkan oleh Departemen Penerangan Sulawesi Selatan mengemukakan tiga alasan bagi tuntutan-tuntutan KGSS tersebut adalah : *pertama*, ada Brigade-Brigade atau Divisi-Divisi seluruhnya yang juga terdiri dari orang-orang daerah yang bersangkutan dibagian lain Indonesia, jadi kenapa KGSS di Sulawesi selatan dipersulit untuk masuk APRIS?. *Kedua*, jumlah pejuang gerilya di Sulawesi Selatan sangat banyak, diperkirakan 1.500 orang, sehingga paling sedikit dibentuk satu Divisi, dan itu sudah melalui tahap penyaringan berdasarkan syarat-syarat masuk APRIS. *Ketiga*, seharusnya para gerilyawan diperlakukan dengan cara yang sama sebagaimana memperlakukan para bekas kesatuan KNIL yang diterima dalam Tentara Republik, tanpa banyak persyaratan dan birokrasi yang menyulitkan (Van Dijk, 1983: 158).

Sedangkan Kolonel Kawilarang menolak usulan KGSS dan Kahar Muzakkar dengan alasan bahwa keinginan mereka menyimpang dari dasar-dasar yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat yang menyebutkan bahwa: a). Satuan-satuan pejuang yang ingin tetap dalam angkatan perang adalah setinggi-tingginya berbentuk Batalyon, b). Satuan-satuan tersebut akan menjadi bagian dari Brigade Hasanuddin,

dan dengan ketentuan ini sangat jelas bahwa tidak disebut akan menjadi Brigade Hasanuddin. Dan c). Tuntutan daerah oleh suatu pasukan tentara tidak pernah terjadi di Indonesia kecuali tuntutan dari pemberontak Abdul Aziz, yang menamakan dirinya RMS dan pemberontakan APRA oleh Westerling (Anhar Gonggong, 1990:198).

Sebaliknya, Abdul Akhar Muzakkar dan pasukannya berpendapat bahwa tuntutannya adalah wajar, karena apa yang dituntut sama halnya dengan tuntutan yang telah ada di provinsi lain di Jawa dan Sumatera. Didaerah-daerah lain sudah dibentuk satuan-satuan stingkat Brigade dan Divisi-Divisi seperti Brigade Mataram, Brigade Diponegoro dan Siliwangi di Jawa. Sehingga adanya kenyataan seperti itu mendorong KGSS berpendapat dalam Anhar Gonggong (1990:199) bahwa : "...Pada tempatnya pula jika di Sulawesi Selatan ini dibentuk suatu Brigade TNI yang anggota-anggotanya terdiri dari putera-putera Sulawesi Selatan sendiri".

Selain alasan tersebut, tuntutan untuk pembentukan satu Brigade Hasanuddin ini beralasan bahwa memang jumlah mereka sangat banyak dan diseleksi dan dimasukkan kedalam anggota APRIS menjadi satu Brigade. Tidak adanya niatan dari Kawilarang dan pemerintah pusat, membuat Kahar Muzakkar menyuruh para pemberontak-pemberontak yang lain mengabaikan KGSS, dan KGSS masih berfungsi, walaupun sekarang posisi KGSS sebagai organisasi ilegal. Dan seluruh keadaan menjadi sangat ironis, menurut Van Dijk (1983:158) ketika pada bulan Agustus para gerilyawan turut membantu Tentara Republik Indonesia dalam

pertempuran di Ujung Pandang yang dilarang meninggalkan apa yang disebut Zone KNIL di Mariso sejak peristiwa-peristiwa bulan Mei. Dan itu merupakan bantuan yang ketiga kalinya para gerilyawan membantu Tentara.

Dalam pemberontakan Andi Aziz pun para gerilya masih membantui Tentara dan memberikan jaminan tempat pendaratan aman bagi Batalyon Worang. Dari berbagai pengorbanan dan perjuangan KGSS tersebut yang sebenarnya dari tanggal 1 Juli 1950 atas dasar dekret Kawilarang, seharusnya KGSS telah bubar tetapi KGSS masih setia terhadap Tentara. Walaupun ditengah-tengah pertempuran terjadi perselisihan antara pejuang gerilya dengan tentara Republik (Van Dijk, 1983: 158-159).

Pada suatu pertemuan dengan para pejuang gerilya dengan para prajurit Republik yang dipimpin oleh Kapten Latief dari Brigade Mataram, pasukan Kapten Latief menembaki dua pemimpin gerilya sampai meninggal. Sehingga kontingen Arif Latief disapu bersih oleh para gerilya setelah terjadinya pertempuran yang hebat. Menurut Van Dijk (1983:159), bahwa diduga tembakan dimulai oleh pihak Republik dengan maksud agar terlepas dari gerilyawan-gerilyawan pengacau ini. Menurut Roeder dalam Van Dijk (1983:159) bahwa tindakan Latief ini bertentangan dengan perintah Soeharto, namun Roeder mengakui bahwa pertempuran ini membangkitkan kebencian rakyat Sulawesi Selatan terhadap "*orang Jawa*". Dan kebencian ini berlarut-larut bertahun-tahun dan merupakan modal yang berharga bagi Kahar Muzakkar dalam pemberontakannya terhadap Republik.

Kekecewaan Kahar Muzakkar terhadap keputusan Kawilarang dan Markas Besar Tentara Republik Indonesia atas dirinya dan KGSS menurut sebagai sumber merupakan sebuah penghinaan atas harga dirinya. Sebagai seorang keturunan Bugis-Makassar kekecewaan serta penghinaan terhadap diri seseorang dinamakan *Siri-Pesse*. Dan sebenarnya inilah yang menjadikan Kahar Muzakkar sangat marah dan akhirnya melakukan perlawanan terhadap Republik Indonesia (Anhar Gonggong, 1990:300).

4.3 LANDASAN DAN POKOK-POKOK PIKIRAN POLITIK ABDUL KAHAR MUZAKKAR

4.3.1 Kahar Muzakkar dan Gerakan DI/TII

Keterlibatan Abdul Kahar Muzakkar dalam gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI/TII) mempunyai sejarah yang panjang. Namun yang pasti tidak bisa dipungkiri bahwa pada tahun 1950an, telah terjalin suatu hubungan yang baik antara Kahar Muzakkar dan Darul Islam di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosoewirjo.

Ketika pemerintah menganjurkan penyelesaian masalah Kahar Muzakkar beserta para gerilyawan pengikutnya untuk kembali kepangkuan Republik Indonesia. Kahar Muzakkar malah memperkuat posisinya dengan melakukan hubungan antara dirinya dan Kartosoewirjo di Jawa Barat. Hubungan pertama yang mereka lakukan adalah pada Agustus tahun 1951 ketika Kartosoewirjo secara pribadi mengirimkan surat kepada Kahar Muzakkar dan menawarkan kepada dirinya pimpinan Tentara Islam Indonesia untuk daerah Sulawesi dan sekitarnya (Van Dijk, 1983:175).

Dalam masa inilah dilakukan pembaharuan hubungan antara ia dan Kartosoewirjo. Hubungan pertama antara mereka telah dilakukan pada bulan Agustus 1950, ketika Kahar Muzakkar masuk hutan. Pada saat itu Kahar Muzakkar didesak melalui perantara Buchari (Bukhari), ketika itu ia adalah seorang wakil ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) dan Abdullah Riau Soshby yang merupakan seorang tamuk pimpinan Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat. Tugas mereka tidak lain untuk membentuk "Komandemen TII" untuk Sulawesi (Barbara Sillar Harvey, 1989:195).

Namun perlu diketahui sebelumnya bahwa hubungan antara Kahar Muzakkar dengan Darul Islam di Jawa Barat atau pun hubungan Kahar Muzakkar dengan golongan yang lainnya, itu merupakan tanggapan dari Kahar Muzakkar dan pasukannya atas keresahan yang mereka rasakan setelah mereka memasuki hutan dan melakukan perlawanan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keresahan tersebut dijelaskan oleh Barbara Sillar Harvey (1989:194) bahwa semenjak Kahar Muzakkar dan para pengikutnya masuk hutan dan menyatakan perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia, mereka disana menghadapi masalah besar yaitu mengenai pembenaran atas tindakan perlawanan dan dasar dari perlawanan yang mereka lakukan tersebut. Barbara Sillar Harvey menjelaskan pula bahwa untuk membenarkan suatu pemberontakan diperlukan suatu motif baru atau suatu ideologi bagi pemberontak yang menjadi dasar atas pemberontakan yang dilakukannya.

Sehingga atas dasar keresahan tersebut, Kahar Muzakkar dan pasukannya berusaha untuk menjalin suatu hubungan yang baik dengan golongan lain sebagai salah satu cara untuk memperkuat posisi mereka dan cara dalam pencarian ideologi atau dasar pemberontakan yang cocok dengan tujuan gerakan yang mereka kehendaki.

Seperti halnya gerakan nasionalis Indonesia, baik Islam maupun Marxisme yang telah melebur dan merupakan unsur yang penting dalam pemikiran politik Indonesia pada saat itu, dan organisasi-organisasi yang secara khusus didasarkan atas pandangan-pandangan ini telah memainkan peranan penting dalam kegiatan nasionalis sebelum perang dan dalam peristiwa-peristiwa politik selama revolusi. Meskipun partai-partai Islam tidak berhasil untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai suatu negara Islam. Namun partai Islam pada saat itu masih menjadi partai kuat di Indonesia, contohnya saja partai Masjumi.

Sama halnya dengan Partai Islam, golongan kiri pun yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI), walaupun sudah disapu bersih setelah peristiwa Madiun pada bulan September 1948, menjelang bulan Januari 1951, PKI kembali menunjukkan eksistensinya dengan pemimpin baru yaitu D.N Aidit. D.N Aidit yang mengambil alih PKI dan mulai membangun kembali apa yang kemudian menjadi partai massa yang paling mengesankan pada saat itu (Barbara Sillar Harvey, 1989:195).

Persaingan antara Masjumi dan PKI-lah yang sebenarnya memperluas dan memperuncing perpecahan antara Islam dan Marxisme. Lain halnya dengan Soekarno yang mempertahankan sintesanya mengenai nasionalisme, agama dan komunisme

yang menjadi slogan utama bagi Demokrasi Terpimpin yang pada akhirnya lebih terkenal dengan slogan NASAKOM (Barbara Sillar harvey, 1989:195).

Berkaitan dengan pembahasan ini, nasionalisme, Islam dan komunisme juga tercampur secara tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan Kahar Muzakkar. Ia telah dididik dan belajar di sekolah Muhammadiyah, kemudian ia pernah di buang dari Luwu karena serangannya terhadap sistem feodal disana. Dan selama masa revolusi ia bekerja di Biro Perjuangan di bawah pengaruh Amir Sjarifuddin, Djokosujono, dan orang-orang yang bersekutu erat dengan golongan kiri.

Dalam tulisannya sendiri, dan dalam gaya hidupnya Kahar Muzakkar mencerminkan unsur-unsur dari apa yang dianggap sebagai ideologi dan parktek komunis. Ia mendasari falsafah kenegaraannya tidak hanya atas agama, tetapi asas "*Keadilan sosial dan Demokrasi Sejati*". Ia terus menentang watak feodal dari masyarakat Sulawesi Selatan, dan melarang para pengikutnya memakai gelar kebangsawanan. Ia menyerang segala bentuk hubungan dengan Belanda termasuk dominasinya di Irian Barat. Ia sendiri hidup dengan sederhana, satu-satunya yang membedakan ia dengan anak buahnya adalah bahwa ia memakai sepatu, memiliki sebuah radio transistor dan kumpulan istri yang lebih banyak dari biasanya (Barbara Sillar harvey, 1989:195-196).

Kembali lagi kepermasalahan keterlibatan Kahar Muzakkar dengan Gerakan Darul Islam (DI), namun sebelum Kahar Muzakkar menyatakan benar-benar bergabung dengan DI/TII dan menjadi Panglima Divisi Hasanuddin, perlu diketahui bahwa tidak hanya Kartosoewirjo dengan Darul Islamnya saja yang mengajak Kahar

Muzakkar untuk melakukan suatu kerjasama. Tetapi PKI pun berusaha untuk menarik simpati Kahar Muzakkar beserta pasukannya agar menggunakan ideologi Komunis sebagai ideologi perjuangannya.

Keterangan tersebut menjelaskan bahwa selain Darul Islam, Partai Komunis Indonesia pun berusaha untuk mendekati dan mempengaruhi Kahar Muzakkar beserta pasukannya agar mau bergabung dan memakai ideologi komunis sebagai dasar gerakannya. Pernyataan tersebut sesuai dengan penjelasan Barbara Sillar Harvey dalam bukunya *Pemberontakan Kahar Muzakkar, dari Tradisi ke DI/TII* (1989:197):

Dalam cerita Kahar sendiri mengenai awal pemberontakan, ia berkata bahwa Komite Sentral PKI mengirim dua orang yang telah dikenalnya di Jawa untuk menghubungi dirinya pada akhir tahun 1950. Letnan Kolonel Pramudji (atau Pamudji) yang menjadi rekannya di Dewan kelasjkan, dan Mohammad junus, seorang teman sekelasnya di sekolah Mualimin Muhammadiyah di Solo. (Ia berkata bahwa Mohammad Junus ditunjuk sebagai wakil PKI di Sulawesi dan Maluku, sebagai wakil Karel Supit, dan telah membuka kantor di rumah Paise, seorang anggota PKI di Makasar). Dalam cerita ini dua delegasi tersebut bertemu dengan Kahar dan sejumlah Komandannya (ia menyebut Saleh Sahban, Kaso gani, Andi Tanriadjeng, Andi Selle dan Andi Sose) setuju untuk membentuk sebuah badan kerja sama untuk mendukung persatuan nasional dan memotong hubungan kolonial yang terjalin oleh tipu muslihat dari persetujuan Linggarjati, renville dan Konferensi meja Bundar yang masih mengikat Indonesia. (Barbara Sillars harvey, 1989:197).

Pernyataan Barbara Silallar Harvey tersebut didukung oleh Syafarudin Usman dalam bukunya *Tragedi patriot dan pemberontakan Kahar Muzakkar* (2010:32). Syafarudin Usman membenarkan bahwa setelah Kahar Muzakkar melakukan pelarian ke hutan bulan Juli 1950, ia segera dihubungi oleh sejumlah wakil dari beberapa organisasi yang beraliran Komunis dan yang berpaham Islam militan untuk melakukan barbagai kerjasama. Dan orang yang memainkan peran penting dalam

upaya mengatur perundingan dengan Kahar Muzakkar tahun 1950 dan 1951 adalah politisi Bugis yaitu Salawati Daud. Yang menurut pendapat lain bahwa Salawati Daudlah yang mempengaruhi Kahar Muzakkar dengan paham komunis. Tetapi ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa Salawati Daud pulalah yang melaporkan kepada Pemerintah Republik Indonesia mengenai kehidupan Kahar Muzakkar beserta anak buahnya didalam hutan selama tahun 1950-1951.

Barbara Sillar harvey (1989:197) kembali mempertegas bahwa langkah awal dalam kerja sama antara kahar Muzakkar dan PKI ini terlihat dengan permintaan Kahar terhadap Pramudji untuk mengirimnkan bantuan militer kepada seorang perwira Jepang, yang menggunakan samaran Umar yang merupakan perwira dalam barisan sakit Hati di Jawa. Namun setelah dua tahun, Umar belum kembali membawa bantuan militer yang diminta Kahar, sehingga Kahar mengirim seorang kurir ke Jawa dan kurir tersebut kembali bukan disertai dengan Umar melainkan eks Mayor Kadarisman yang waktu itu menggunakan nama Pitojo. Kahar Muzakkar sangat mengenal Pitojo karena Kadarisman pada saat terjadinya peristiwa Madiun 1948 berhasil melucuti dua Kompi pasukan kahar dibawah komando Letnan Sjamsul Bachri dan Letnan Eddy sabara.

Seorang delegasi PKI lainnya segera menyusul, yaitu Jusuf karnian. Ia dibawa oleh Andi kaso yang merupakan anak laki-laki dari Juru Bicara hadat Luwu Andi Pangerang. Dikabarkan bahwa Pitojo dan Jusuf Karnian mengajar anak-naka sekolah Dasar di Enrekang. Namun Barbara Sillar Harvey menyimpulkan bahwa tidak lama setelah kehadiran Pitojo dan Jusuf Karnian, Kahar Muzakkar memerintahkan

pasukannya untuk membunuh mereka. Tidak diketahui pasti mengapa mereka harus dibunuh, tetapi analisis penulis dalam hal ini, bahwa Kahar Muzakkar telah memutuskan bahwa pemberontakan dan perjuangan yang ia lakukan tidak akan berdasarkan Komunisme.

Sehingga dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bukan hanya Darul Islam di Jawa Barat saja yang melakukan pendekatan terhadap Kahar Muzakkar dan pasukannya di Sulawesi Selatan, melainkan Partai Komunis Indonesia pun tidak mau ketinggalan untuk dapat merebut hati Kahar Muzakkar dan menyarankan agar ide-ide komunislah yang menjadi dasar dari gerakan Kahar Muzakkar beserta pasukannya. Namun usaha PKI dalam hal ini dianggap gagal karena pada akhirnya Kahar Muzakkar ternyata lebih memilih untuk bergabung dengan Gerakan Darul Islam yang dipimpin oleh Kartosoewirjo.

Beralih kedalam penjelasan mengenai usaha Darul Islam di Jawa Barat untuk mendapatkan simpatik dari Kahar Muzakkar dan pasukannya, Al Chaidar menjelaskan bahwa ketika pemerintah Republik Indonesia melakukan penyelesaian konflik Kahar Muzakkar dengan *politik Psikologisnya*, Kahar Muzakkar malah memperkuat posisinya dengan melakukan pembaharuan hubungan dengan S.M. Kartosoewirjo di Jawa Barat.

Menurut sumber-sumber Angkatan Darat, Kahar menggabungkan diri dengan DI pada tanggal 16 Agustus 1951 ketika ia kembali ke hutan setelah persetujuan CTN-TNI mengalami kegagalan. Pernyataan tersebut didukung dengan dokumen yang penulis dapatkan dari Dinas Sejarah Militer Angkatan Darat Bandung, yang

terdapat dalam *Himpunan Dokumen Yang Berkaitan Dengan Masalah DI/TII Kahar Muzakkar Di Sulawesi Selatan Tenggara Dan Operasi Penumpasannya*, yang ditulis oleh Kodam Hasanuddin tahun 1952. Kutipan tersebut sebagai berikut :

Dalam rangka usaha penyelesaian ex CTN Sulawesi selatan secara "Bijaksana" oleh pihak TT-VII, maka atas persetujuan Overste Warouw, Gubernur Sulawesi Soediro sejak akhir Desember 1951 telah mengadakan hubungan dengan Kahar Muzakkar dengan persetujuan bahwa akan diadakan pertemuan antara gubernur Soediro dan kahar Muzakkar pada pertengahan bulan Januari 1952. Tetapi sebelum tanggal tersebut Kahar Muzakkar mengirim surat dengan permintaan menunda pertemuan tersebut, sampai tanggal 15 Maret 1952. Tetapi pertemuan akan ditentukan olehnya pada tanggal 12 Maret 1952. Pada tanggal tersebut Gubernur Soediro menerima surat pembatalan pertemuan itu lagi dengan alasan adanya siasat buruk dari pihak TT-VII. Sungguh pun gubernur Sulawesi terpaksa kembali dengan tangan hampa. Ibu Salawati meneruskan perjalanan untuk berusaha menemui Kahar Muzakkar dengan pelantaraan Andi Tantriadjeng, Ibu Salawati dapat bertemu juga dengan Kahar Muzakkar, tetapi tiga hari pembicaraan tak memberikan hasil suatupun juga.

Dua hari Kahar Muzakkar mengulur waktu untuk bertemu dengan Sudiro. Alasannya adalah 1001 macam dan hasil ini sudah dapat diduga lebih dahulu. Penguluran waktu itu dapat diartikan bahwa Kahar Muzakkar taat pada instruksi Kartosoewirjo, pemimpin dari Gerakan Darul Islam, sebagai tertera dalam surat menyurat mereka sebagai berikut :

Dengan surat keputusan Komandan tertinggi Angkatan Perang Negara Islam Indonesia No.101/X/51, Kahar Muzakkar telah diangkat dengan Resmi sebagai Panglima Divisi Tentara Islam Indonesia.

Pada surat Kahar tertanggal 20-1-1952 No. 1055/S.R./Co B.H/II A/58 kepada Kartosoewirjo sebagai Panglima Tertinggi Tentara Islam Indonesia, ia antara lain telah mengakui langkah dan Program T.I.I.

Pada surat Kartosoewirjo kepada Kahar Muzakkar sebagai Panglima Divisi IV/TII tanggal 27/2/1952 No 231/D/52, diinstruksikan a.L. bahwa TII tidak mengenal compromis dan tidak menghendaki penyelesaian secara local.

Inilah menjadi sebab sehingga pimpinan angkatan perang dan pemerintah kemudian menyelesaikan peristiwa xc CTN secara setempat dengan mengadakan kontak dengan bataliyon-bataliyon Andi Sose, Azis taba, Kaso Mas'ud, Idrus dan lain-lain tanpa melalui Kahar Muzakkar lagi.

(buku kementerian penerangan RI prov. Sulawesi)

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa Kahar Muzakkar mencoba menjalankan perintah Kartosoewirjo untuk tidak melakukan perundingan dengan pihak pemerintah Republik Indonesia. Dan ia mulai menerima tawaran kartosoewirjo dengan ideologi Islamnya. Namun dalam hal ini kahar Muzakkar belum berani memutuskan untuk benar-benar bergabung dengan DI/TII (Al Chaidar, 1420 H:143).

Selain Kartosoewirjo mengirimkan surat secara pribadi kepada Kahar Muzakkar, dalam usahanya untuk menarik simpati Kahar Muzakkar. ia pun mengutus seorang utusan untuk dapat mendesak Kahar Muzakkar agar mau bergabung dengan Darul Islam di Jawa Barat dan memangku jabatan sebagai Komandan Darul Islam Indonesia untuk wilayah Sulawesi dan sekitarnya.

Bahar Matallioe yang merupakan anak buah kepercayaan Kahar Muzakkar pada saat gerakan tersebut berlangsung menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Pemberontakan Meniti Jalur Kanan* (1994:183) bahwa ketika terjadinya perlawanan di Sulawesi Selatan terhadap pemerintahan Republik Indonesia, S.M. Kartosoewirjo telah mempersiapkan seorang utusan yang bernama Arnaz yang direncanakan akan menjadi calon panglima DI/TII di Sulawesi Selatan. Utusan Arnaz datang menemui dirinya dengan membawa dokumen yang berisi penjelasan-penjelasan tentang perjuangan Islam yang dikutip dari *Pedoman Dharma Bhkati* yang telah disusun oleh Imam Kartosoewirjo. Dalam surat Arnaz tersebut, ia menyampaikan pujian dan penghargaan atas prestasi yang telah dicapainya dan mengharapkan ia membentuk satu negara Islam di Sulawesi Selatan.

Namun, berkas dokumen yang dikirimkan oleh Arnaz tersebut segera ia kirim kepada Kahar Muzakkar dan memaksanya untuk memproklamasikan berdirinya Negara Islam di Sulawesi Selatan sebelum posisi tersebut diisi oleh Arnaz sebagai calon panglima yang diusulkan oleh Kartosoewirjo. Bahar Mattalioe pun menekankan pada Kahar Muzakkar bahwa tidak ada untungnya perjuangan yang dilakukannya selama ini jika tanpa suatu dasar perjuangan yang jelas, dan sebaiknya sebagai seorang pemimpin Kahar Muzakkar tak perlu ragu karena ia akan sepenuhnya mendukung jika akhirnya Islam lah yang dipilih sebagai ideologi.

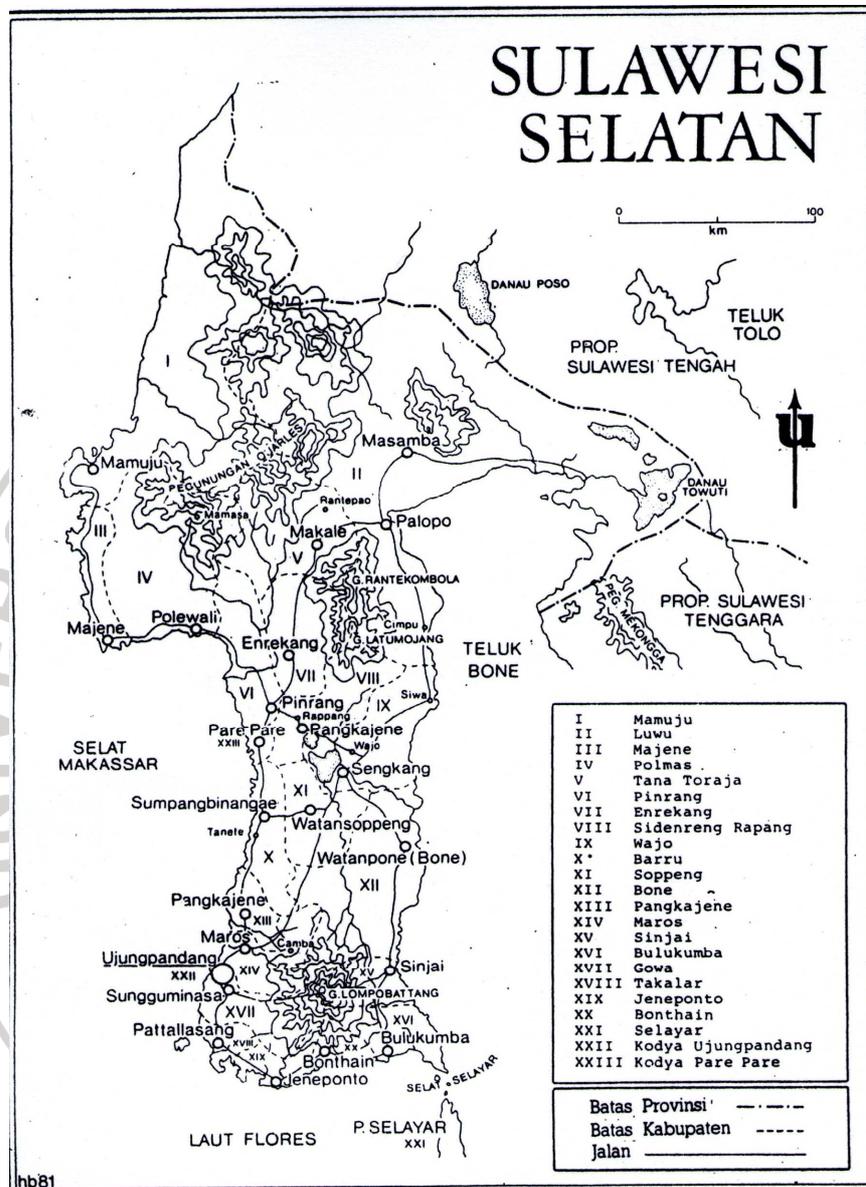
Sehingga dari kedua sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa Darul Islam yang di pimpin oleh Imam Kartosoewirjo memang melakukan usaha-usaha untuk menarik simpatik Kahar Muzakkar dan pasukannya agar mau bergabung dengan Darul Islam di Jawa Barat dan membentuk sebuah Negara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan. Namun, menyikapi hal tersebut Kahar Muzakkar dan pasukannya masih terus mempertimbangkan tawaran tersebut dan belum secara resmi menerima atau menolak usulan dari Kartosoewirjo tersebut.

Keputusan Kahar Muzakkar terhadap Ideologi yang akan dipilihnya sangat ia pertimbangkan dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Kahar Muzakkar tidak bertindak egois yang hanya mengandalkan pemikirannya saja tetapi ia pun menyelidiki dan bertanya kepada para pengikutnya yang dianggap masih setia mengenai dasar gerakannya tersebut. Hal ini seperti yang dijelaskan Barbara Sillar Harvey (1989:198):

... Kahar menghadapi kebutuhan mendesak untuk memastikan kesetiaan pasukan-pasukannya yang masih tinggal dan dukungan rakyat yang diandalkan dalam suatu situasi peperangan gerilya. Ia diberitakan telah menyelidiki para komandan bawahannya, dan telah menanyai mereka apakah perjuangan mereka harus didasarkan pada Komunis atau Islam. Hanya Usman Balo dan Hamid Ali yang bersikap dingin terhadap gagasan suatu negara Islam. Bahar Mattalioe terutama berkeras bahwa hanya dengan mendasarkan perjuangannya pada Islam mereka akan dapat memperoleh dukungan dari rakyat Sulawesi Selatan.

Selain pernyataan tersebut, Barbara Sillars Harvey menjelaskan analisisnya bahawa Kahar Muzakkar telah memperhitungkan jika ia memilih Komunis sebagai dasar perjuangannya maka dukungan para anggota progresif bangsawan yang menyetujui cita-cita keadilan sosial akan hilang, sehingga ia mencoba mempertahankan dukungan mereka tanpa menghilangkan ide keadilan sosial tersebut dengan mendasarkan perjuangannya pada ideologi Islam untuk menegakan suatu Negara Islam Indonesia. Perkiraanannya bahwa Islam dengan prinsip persamaan haknya dapat digunakan sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial tersebut.

Sehingga atas pertimbangan yang matang dan dengan didorong oleh pendapat pasukan-pasukannya tersebut, maka pada tanggal 20 Januari 1952 Kahar Muzakkar memutuskan bahwa dasar dari perlawanan yang dilakukannya beserta pasukan-pasukannya di Sulawesi Selatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia akan didasarkan pada ideologi Islam dan dengan ini ia beserta pasukannya menyatakan bergabung dengan Darul Islam di Jawa Barat pimpinan Kartosoewirjo dan ia menerima jabatan sebagai Komandan Tentara Islam Indonesia untuk wilayah Sulawesi dan sekitarnya.



Gambar 4.2 Peta wilayah DI/TII Sulawesi Selatan

Diambil dari : Buku *Darul Islam sebuah pemberontakan* Karya C. Van Dijk (1983).

Namun, walaupun Kahar Muzakkar telah bergabung dan menjabat sebagai panglima daerah Tentara Islam Indonesia, tetapi ia untuk sementara tidak mau

menggunakan nama itu untuk pasukan-pasukannya. Terlihat bahwa pada bulan Maret 1952 Kahar Muzakkar menamakan pasukan-pasukannya sebagai Tentara Kemerdekaan Rakyat (TKR) dengan konsep Trisilanya yaitu : (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Keadilan sosial, dan (3) Kemanusiaan. Dan baru pada tanggal 7 Agustus 1953, tepat 3 tahun setelah proklamasi Negara Islam Kartosoewirjo, Kahar Muzakkar menyatakan bahwa Sulawesi dan daerah-daerah sekitarnya (yaitu Indonesia Timur lainnya, termasuk Irian Barat) sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia dan menamakan pasukannya sebagai Tentara Islam Indonesia.

Penggabungan Kahar Muzakkar dengan Gerakan DII/TII Kartosoewirjo di Jawa Barat diresmikan dengan diproklamirkannya proklamasi oleh Kahar Muzakkar. Dengan bendera negara yang berwarna dasar merah putih dengan lambang bulan bintang ditengahnya. Dan mulai saat itu Kahar Muzakkar resmi bergabung dengan Darul Islam pimpinan S.M Kartosoewirjo di Jawa Barat. Adapun teks proklamasi tersebut adalah sebagai berikut :

10

PROKLAMASI
DI/TII SULAWESI SELATAN TENGGARA

Tgl. 7 Agustus 1953.-

PROKLAMASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DENGAN NAMA ALLAH JANG MAHA MURAH DAN PENGASIH

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ

Berdasarkan pernyataan berdirinja Negara Republik Islam Indonesia pada tanggal 12 Sawal 1368 / 7 Agustus 1949 oleh Imam Kartosuwirjo atas nama Umat Islam Bangsa Indonesia, dengan ini kami njatakan daerah Sulawesi dan daerah sekitarnja mendjadi bagian dari pada Negara Republik Islam Indonesia.-

ALLAHU AKBAR ! ALLAHU AKBAR ! ALLAHU AKBAR !

Medan Djihad, 27 Dzulidjaja 1372
7 Agustus 1953.

ATAS NAMA UMMAT ISLAM DAERAH SULAWESI
DAN DAERAH SEKITARNJA

t.t.d.

(ABDUL QAHAH MUZAKKAR).-

Sumber : Bagian I/506.-

Makassar, 7 Desember 1950.-

Gambar 4.3 Teks Proklamasi penggabungan antara Abdul Kahar Muzakkar dengan DI/TII Kartosowirjo di Jawa Barat.
(diperoleh dari dokumen Dinas Sejarah Angkatan Darat Bandung, Bagian 1/506 dalam Himpunan Dokumen yang Berkaitan dengan Masalah DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan Tenggara Dan Operasi Penumpasannya, yang ditulis oleh Kodam Hasanuddin tahun 1960).

Demikianlah pada tanggal 7 Agustus 1953, secara resmi Kahar Muzakkar dan pasukannya benar-benar bergabung dengan gerakan DII/TII dan pasukannya tidak lagi bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) melainkan berubah menjadi Tentara Islam Indonesia (TII). Dalam kaitannya dengan keputusan Kahar Muzakkar yang lebih memilih ideologi Islam dibanding Komunis dan Nasionalis, Anhar Gonggong (1990:228) memiliki analisis mengenai hal tersebut. Menurutnya telah terjadinya suatu pertemuan kesamaan antara suasana lingkungan masyarakat yang berkeyakinan kuat terhadap Islam dengan kebudayaan setempat dan lingkup pendidikan yang pernah diperoleh Kahar Muzakkar (Anhar Gonggong, 1990:242).

Lebih lanjut Anhar Gonggong menjelaskan bahwa keputusan terhadap pemilihan Ideologi Islam tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan Kahar Muzakkar yang seorang bekas anak Pesantren di Jawa yang cukup taat dan menjunjung tinggi nilai keislaman. Latar belakang pendidikan Islam yang dimilikinya tersebut berasimiliasi dengan suasana lingkungan di Sulawesi Selatan yang mayoritas merupakan masyarakat Islam yang berkeyakinan kuat terhadap kebudayaannya. Sehingga hal tersebut menjadi alasan Kahar Muzakkar harus memilih Islam sebagai Ideologi perjuangannya, tetapi hal ini terlepas dari kepentingannya terhadap dukungan dari para pendukungnya.

Selain analisis tersebut, Kholid O. Santosa dalam bukunya yang berjudul *Manusia dipanggung Sejarah* (2009:145), Ia Menjelaskan bahwa Kahar Muzkkar berencana ingin melakukan sebuah revolusi namun rencana itu gagal karena bawahannya tidak teguh pada pendiriannya. Dalam hal ini Kartosoewirjo mencoba

mendesak Kahar Muzakkar agar melakukan upaya untuk menjadikan pasukannya bersemangat Islam dan bernegara Islam, serta melanjutkan hal-hal yang diperlukan dan dianjurkan oleh Syariat Islam selama perang. Sehingga rencana melakukan revolusi yang diinginkan Kahar akan tercapai. Dan Kahar Muzakkar beranggapan bahwa hanya dengan Islamlah sebuah revolusi akan berjalan sesuai tujuannya.

Semangat untuk melakukan revolusi tersebut semakin berkobar setelah Kahar Muzakkar mengalihkan pandangannya dengan menggunakan Islam sebagai dasar perjuangannya yang memang hal tersebut disesuaikan dengan emosi masyarakat Sulawesi Selatan yang terkenal sebagai penganut Islam fanatik.

Demikianlah Kahar Muzakkar menjadi panglima Divisi IV Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan dengan nama Divisi Hasanuddin. Kahar Muzakkar sangat berterima kasih dan menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan Kartosoewirjo atas pengangkatan dirinya menjadi panglima Tentara Islam Indonesia untuk daerah Sulawesi. Namun, Kahar Muzakkar menjelaskan pula bahwa ia tidak dapat sepenuhnya mengabdikan diri karena berbagai keadaan yang mungkin merintanginya dalam setiap tindakan yang diambilnya sebagai panglima Tentara Islam Indonesia (C. V. Dijk, 1983: 175).

Atas dasar pernyataan Kahar Muzakkar tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara gerakan Darul Islam di Sulawesi Selatan dengan di Jawa Barat tampaknya tidak begitu karab. Tidak adanya tanda-tanda semacam tuntutan Ideologi yang mendalam yang diberikan Kartosoewirjo terhadap Darul Islam di Sulawesi Selatan. C.V Dijk menambahkan pula bahwa Kahar Muzakkar pun sepertinya tidak

menilai tinggi konsep politik Negara Islam Indonesia yang digagas oleh Kartosoewirjo.

4.3.2 Hubungan Abdul Kahar Muzakkar dengan S. M. Kartosoewirjo

Seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab diatas bahwa keterlibatan antara Kahar Muzakkar dengan Darul Islam Tentara Islam Indoensia (DI/TII) tidak terlepas dari perang Kartosoewirjo sebagai panglima tertinggi Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat. Menurut analisis penulis bahwa Kartosoewirjo cukup cerdas dengan melakukan suatu hubungan kerjasama dengan Kahar Muzakkar.

Seperti yang sudah dibahas dalam pembahasan sebelumnya bahwa Kahar Muzakkar memasuki hutan dan bergabung dengan para Gerilyawan Sulawesi Selatan pada tahun 1950an dan meletakkan tanda Letkolnya, merupakan indikasi kekecewaannya terhadap APRIS karena tidak bisa memenuhi keinginan KGSS untuk bisa masuk kedalam APRIS dalam suatu Brigade Hasanuddin dan Kahar Muzakkar menjadi Komanadnnya.

Melihat hal tersebut, tampaknya Kartosoewirjo berusaha untuk membujuk Kahar Muzakkar untuk mau bergabung dengan DI/TII dan memberikan konfensi bagi Kahar Muzakkar apabila mau bergabung dengan DI/TII Kartosoewirjo di Jawa Barat. Maka, ketika pemerintah menganjurkan penyelesaian masalah Kahar Muzakkar beserta para gerilyawan pengikutnya untuk kembali kepangkuan Republik Indonesia. Kartosoewirjo berusaha untuk memperkuat posisi Kahar Muzakkar dengan melakukan hubungan antara dirinya dan Kahar Muzakkar. Hubungan pertama

yang mereka lakukan adalah pada Agustus tahun 1951 ketika Kartosoewirjo secara pribadi mengirimkan surat kepada Kahar Muzakkar dan menawarkan kepada dirinya pimpinan Tentara Islam Indonesia untuk daerah Sulawesi dan sekitarnya (Van Dijk, 1983:175).

Dalam masa inilah dilakukan pembaharuan hubungan antara ia dan Kartosoewirjo. Hubungan pertama antara mereka telah dilakukan pada bulan Agustus 1950, ketika Kahar Muzakkar masuk hutan. Pada saat itu Kahar Muzakkar didesak melalui perantara Buchari (Bukhari), ketika itu ia adalah seorang wakil ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) dan Abdullah Riau Soshby yang merupakan seorang tamuk pimpinan Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat. Tugas mereka tidak lain untuk membentuk "Komandemen TII" untuk Sulawesi.

Jika kita analisis situasi dan kondisi Kahar Muzakkar pada saat itu, jelas sangat menguntungkan, disatu sisi Kahar Muzakkar dan KGSS dibuang oleh Tentara Republik sedangkan disisi lain Kahar dan KGSS sangat dihargai dan akan mendapat posisi yang penting dalam Darul Islam oleh Kartosoewirjo. Sehingga jelas bagi Kahar untuk memilih tawaran dari Kartosoewirjo tersebut.

Selain alasan diatas, Anhar Gonggong (1990:242) menjelaskan bahwa keputusan terhadap pemilihan Ideologi Islam tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan Kahar Muzakkar yang seorang bekas anak Pesantren di Jawa yang cukup taat dan menjunjung tinggi nilai keislaman. Latar belakang pendidikan Islam yang dimilikinya tersebut berasimiliasi dengan suasana lingkungan di Sulawesi Selatan yang mayoritas merupakan masyarakat Islam yang berkeyakinan kuat terhadap

kebudayaannya. Sehingga hal tersebut menjadi alasan Kahar Muzakkar harus memilih Islam sebagai Ideologi perjuangannya, tetapi hal ini terlepas dari kepentingannya terhadap dukungan dari para pendukungnya.

Demikianlah Kahar Muzakkar menjadi panglima Divisi IV Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan dengan nama Divisi Hasanuddin. Kahar Muzakkar sangat berterima kasih dan menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan Kartosoewirjo atas pengangkatan dirinya menjadi panglima Tentara Islam Indonesia untuk daerah Sulawesi. Namun, Kahar Muzakkar menjelaskan pula bahwa ia tidak dapat sepenuhnya mengabdikan diri karena berbagai keadaan yang mungkin merintanginya dalam setiap tindakan yang diambilnya sebagai panglima Tentara Islam Indonesia (C. V. Dijk, 1983: 175).

Atas dasar pernyataan Kahar Muzakkar tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara gerakan Darul Islam di Sulawesi Selatan dengan di Jawa Barat tampaknya tidak begitu karab. Tidak adanya tanda-tanda semacam tuntutan Ideologi yang mendalam yang diberikan Kartosoewirjo terhadap Darul Islam di Sulawesi Selatan. C.V Dijk menambahkan pula bahwa Kahar Muzakkar pun sepertinya tidak menilai tinggi konsep politik Negara Islam Indonesia yang digagas oleh Kartosoewirjo.

4.3.3 Konsep Negara Demokratis Indonesia

Ketika Kahar Muzakkar secara resmi menyatakan bergabung dengan Darul Islam yang dipimpin oleh S.M Kartosoewirjo yaitu pada tanggal 7 Agustus 1953, itu

berarti telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dari gerakan yang dipimpinnya. Perubahan yang dimaksud dijelaskan oleh Anhar Gonggong (1990:244) dalam bukunya yang berjudul "*Abdul Qahar Muzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak*", adalah perubahan yang menyangkut kedalam dua hal yaitu : (1) Ideologi gerakan dan (2) Tujuan gerakan.

Ketika gerakan Kahar Muzakkar masih bernama Crop Tjadangan Nasional (CTN) dan kemudian berganti menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), maka ideologi gerakannya masih berdasarkan pada Pancasila dan tujuan gerakannya untuk menjadi anggota APRI (S). Sedangkan setelah Kahar Muzakkar menyatakan dirinya merupakan bagian dari Darul Islam di Jawa Barat, maka tentu saja ideologi dan tujuan gerakannya pun ikut berubah.

Anhar Gonggong (1990: 198) menjelaskan pula bahwa gerakan yang dilakukan oleh Kahar Muzakkar memiliki dua tahap yang berbeda yaitu : *Tahap pertama* tahun 1951-1953 (sampai pada proklamasi penggabungan dengan Darul Islam tanggal 7 Agustus 1953) sebagai tahap penggalangan dan masa peralihan dan *Tahap kedua* tahun 1953-1965 adalah tahap yang disebut sebagai *revolute Islam*. Dari kedua tahap ini jelas terlihat perubahan dalam setiap aspek perjuangan Kahar Muzakkar dari ideologi Pancasila menjadi ideologi Islam. Namun, dari kedua ideologi tersebut ternyata Kahar Muzakkar memiliki pandangan dan tafsiran lain terhadap keduanya.

Pernyataan Anhar Gonggong tersebut sejalan dengan pendapat Kholid O. Santosa (2009:201) bahwa ketika pernyataan kesediaan Kahar Muzakkar untuk

bergabung dengan Darul Islam dan menerima pengangkatannya sebagai Panglima Divisi Hasanuddin, ia menyatakan pula bahwa ia tidak dapat sepenuhnya mengabdikan diri terhadap Negara Islam Indonesia yang dikehendaki oleh Kartosoewirjo, karena pada saat itu, ada beberapa pasukannya yang bukan beragama Islam melainkan Kristen.

Atas dasar pernyataan tersebut, C.V Dijk (1983:175) menambahkan bahwa hubungan antara gerakan Darul Islam di Sulawesi Selatan dengan di Jawa Barat tampaknya tidak begitu karab. Tidak adanya tanda-tanda semacam tuntutan Ideologi yang mendalam yang diberikan Kartosoewirjo terhadap Darul Islam di Sulawesi Selatan. C.V Dijk memperjelas pula dengan menyatakan bahwa Kahar Muzakkar pun seperti halnya tidak menilai tinggi konsep politik Negara Islam Indonesia yang digagas oleh Kartosoewirjo.

Dengan demikian, gerakan Abdul Kahar Muzakkar ini pada dasarnya sejak awal tidak dimaksudkan untuk memperjuangkan ide-ide Islam. Bahkan dalam rentang waktu 1950-1965 selama gerakannya berlangsung, hanya dalam kurun waktu antara Agustus 1953 sampai dengan tahun 1960, Abdul kahar Muzakkar bertindak atas nama Negara Islam Indonesia. Karena dalam kurun waktu antara tahun 1950 sampai sebelum 7 Agustus 1953, ia belum menggunakan simbol-simbol Islam sebagai dasar gerakannya.

Menurut Andi Wanua tengke dalam Syihabuddin (2006:138) selama kurun waktu tiga tahun tersebut yaitu dari tahun 1950-1953 Kahar Muzakkar merupakan tokoh yang memperjuangkan Pancasila, namun setelah ia bergabung dengan DI/TII

Kartosoewirjo di Jawa Barat ia mulai mengubah ideologi perjuangannya dan memilih di jalan agama Allah yaitu Islam. Dengan bergabungnya Kahar Muzakkar dengan DI/TII Kartosoewirjo di Jawa Barat maka disusunlah sebuah Konstitusi Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan nama "*Piagam Makalua*", dinamakan Makalua karena sesuai dengan tempat diadakannya kongres tersebut.

Menurut C.V Dijk (1983:178), ketika menganalisis isi Piagam Makalua tersebut, ia menyatakan keheranannya karena piagam tersebut berserta dokumen-dokumen Darul Islam Abdul Kahar Muzakkar lebih banyak memuat mengenai pasal-pasal yang mengatur kehidupan ekonomi, dan tidak terlalu membahas mengenai Negara Islam Indonesia ataupun pembahasan yang rinci mengenai konsep negara Islam.

Dari pernyataan tersebut, B.J Boland dalam Syihabuddin (2006:142) dengan tegas menulis bahwa kemunculan gerakan Abdul Kahar Muzakkar sebenarnya sangat kecil kaitannya dengan cita-cita Darul Islam. Ia menambahkan bahwa faktor yang mendorong gerakan tersebut menjadi besar adalah masalah kekecewaan dan rasa kesal antara patriot Bugis-Makassar terhadap pejabat Tentara yang datang dari daerah lain. Barbara Sillar Harvey (1989) berpendapat bahwa istilah persaingan antara perwira Minahasa dan Bugis memicu munculnya gerakan Abdul Kahar Muzakkar. Sedangkan menurut Zainabun Harahap menyebutkan bahwa faktor Psikologis dan perbedaan suku yang menjadi latar belakang munculnya gerakan ini.

Sehingga perlu ditegaskan lagi bahwa gerakan Abdul Kahar Muzakkar pada dasarnya sejak awal tidak dimaksudkan untuk memperjuangkan ide-ide Islam, karena

baru pada tanggal 7 Agustus 1953 ia secara resmi bergabung dengan DI/TII Kartosoewirjo di Jawa Barat maka dengan demikian dimulailah pemikiran politik Kahar Muzakkar tentang konsep negara dan pemerintahan Indonesia. Namun sejalan dengan hal tersebut, terdapat beberapa perbedaan yang mendasar antara pemikiran politik Kartosoewirjo dan pemikiran politik Kahar Muzakkar.

Seperti yang kita tahu bahwa Kartosoewirjo menginginkan Indonesia menjadi Negara Islam Indonesia yang berbentuk Presidensial yang pemerintahannya dipegang oleh presiden sebagai kepala negara dan dibantu oleh menteri-menteri yang dipilih langsung oleh rakyat, dan Indonesia akan menjadi negara Islam (Al Chaidar, 1420 H:96). Sedangkan Kahar Muzakkar lebih menginginkan adanya kebebasan atau otonomi daerah yang seluas-luasnya tanpa terlalu diatur oleh pusat sehingga Kahar Muzakkar lebih memilih agar Indonesia menjadi negara Federal dengan hukum Islam.

Menurut Syihabuddin (2006:121), bahwa Kahar Muzakkar memiliki pemikiran mengenai konsep negara demokrasi Indonesia yang tentunya berbeda dengan konsep Negara Islam Indonesia yang digagas oleh Kartosoewirjo. Hal tersebut dapat dilihat pula didalam buku yang ditulis oleh Kahar Muzakkar sendiri yang berjudul *Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia* (2008). Didalam tulisannya Kahar Muzakkar menamakan konsepsinya dengan istilah "*Demokrasi Sejati*."

Gagasan Kahar Muzakkar tentang demokrasi ini bisa kita pahami dari istilah Demokrasi Sejati yang ia pakai. Ia memberi nama *demokrasi* dengan tambahan kata *sejati*, karena menurutnya kelangsungan sistem demokrasi seharusnya tidak

berlandaskan kepentingan dan kekuasaan manusia belaka. Semua permasalahan manusia tidak mungkin bisa diselesaikan dengan kehendak manusia sendiri. Hal ini dapat dipahami karena dalam demokrasi sejati terdapat nilai-nilai ketuhanan.

Dalam Syihabuddin (2006:144) terdapat penjelasan bahwa konsepsi demokrasi sejati Abdul Akhar Muzakkar berbeda dengan konsepsi demokrasi tokoh-tokoh lain yang pernah merumuskan ide mengenai demokrasi. Menurutnya, demokrasi sejati Abdul Kahar Muzakkar bisa disebut demokrasi *teologi-normatif*. Perbedaan arti demokrasi antara konsep Abdul Kahar Muzakkar dan tokoh nasionalis lain, sebagai berikut :

Unsur-Unsur	Arti/definisi demokrasi tokoh nasionalis Indonesia	Definisi Demokrasi Abdul Kahar Muzakkar
Dari	Rakyat	Tuhan/Allah
Oleh	Rakyat	<i>Kalangan mayoritas pemeluk agama di Indonesia berdasarkan data faktual</i>
Untuk	Rakyat	Rakyat

Bagan 4.1 perbedaan definisi demokrasi menurut Abdul Kahar Muzakkar

Sehingga dari uraian diatas dapat ditarik pula kesimpulan mengenai konsep demokrasi Indonesia dalam pandangan Abdul Kahar Muzakkar sebagai berikut:

Unsur-unsur	Rumusan demokrasi tokoh nasionalis Indonesia	Rumusan Demokrasi Abdul Kahar Muzakkar
Ideologi	Pancasila	Islam murni (Al-Quran dan Al-Sunah)
Dasar Negara	Pancasila	Piagam Jakarta
Undang-Undang Nasional	UUD 1945/ hukum ketatanegaraan	Hukum-hukum Syariat Islam
Sistem Tata negara	Kesatuan	Federal
Media kompetisi/perjuangannya	Konstitusi/ABRI	Militer Darul Islam/DI/TII

Partisipasi	Seluruh warga negara Indonesia	Seluruh warga negara Indonesia dengan tetap mengutamakan kepentingan pemeluk agama mayoritas
Pemimpin negara	Sari kalangan warga negara di Indonesia	Dari kalangan mayoritas pemeluk agama di Indonesia berdasarkan data faktual

Bagan 4.2 perbandingan rumusan demokrasi Abdul Kahar Muzakkar

Dari bagan diatas, Abdul Kahar Muzakkar menawarkan perlu adanya penegasan yang jelas bahwa kedaulatan dan kekuasaan mutlak milik Tuhan yang diamanahkan kepada manusia untuk dilaksanakan. Didalam bukunya pun (Kahar Muzakkar,2008:125-126) menjelaskan wujud kongkrit batas kedaulatan tuhan dan pendelegasian amanah-Nya kepada manusia, sebagai berikut :

(1) Tuhan berdaulat, tuhan berkuasa dan tuhan mempunyai kedaulatan hukum atas segala segi hidup manusia. Kedaulatan hukum tuhan yang diamanahkan kepada manusia berupa hukum pergaulan hidup manusia di muka bumi yang wajib dilaksanakan oleh manusia, baik golongan manusia yang memerintah maupun golongan manusia yang diperintah, (2) golongan manusia yang memerintah disebut *Ulil Amri* atau pemerintah, memegang amanah kekuasaan Tuhan, melaksanakan hukum Tuhan atas semua manusia yang ada dibawah perintahnya, dan memegang kebijaksanaan pemerintahan (*belied Politic*) atas negara, dan (3) golongan manusia yang diperintah dinamakan umat atau rakyat yang memegang amanah Tuhan dan memegang kekuasaan amanah kekuasaan Tuhan serta memegang kebijaksanaan pemerintahan (*kekuasaan belied politic*) atas negara dalam melaksanakan hukum kedaulatan tuhan. (Kahar Muzakkar,2008:125-126)

Berdasarkan pernyataan diatas sangat jelas bahwa konsep negara yang digagas oleh Kahar Muzakkr adalah Demokrasi Sejati, dan hanya Tuhan lah yang memiliki

kekuasaan mutlak atas hukum manusia. Tommy Thompson dalam Syihabuddin (2006:205) menambahkan bahwa cita-cita dan prinsip Abdul Kahar Muzakkar adalah Islam yang murni yang berlandaskan Kitab suci Al-Quran dan al-Hadist. Sehingga ia menentang segala ideologi yang dibuat manusia diluar Islam.

Selain dasar atau alasan lain, Abdul Kahar Muzakkar berpendapat pula bahwa kelompok muslim di Indonesia adalah kelompok mayoritas sehingga tidak ada alasan lagi bagi Islam untuk tidak menjadi dasar dari negara ini, dan tidak ada alasan pula bagi agama-agama lain untuk kontra terhadap hal ini. Karena penganut agama lain selain Islam akan tetap dilindungi keberadaannya. Sehingga untuk menunjang ide-ide ini diperlukan bentuk negara yang memberikan kebebasan bagi daerahnya masing-masing atau dengan kata lain adalah bentuk negara federal Indonesia.

Pemikiran Kahar Muzakkar mengenai ideologi atau dasar negara yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist ini dituangkannya dalam suatu Undang-undang RPII (Republik Persatuan Islam Indonesia). Menurut Anhar Gonggong (1990:383) bahwa, UUD RPII ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan lainnya yaitu :

1. Kedaulatan negara yang bersendi pokok pada Al-Quran dan Al-Hadist.
2. Cita-cita hidup negara berada diatas landasan hidup moral dan politik.
3. Kerangka negara yang menampakan keluhuran ajaran Islam, memelihara semangat hidup negara dalam perjuangan mencapai masyarakat makmur, tentram, demokratis, dan bahagia diatas landasan hidup moral dan politik, menggalang persaudaraan manusia dunia Islam
4. Susunan ketatanegaraan dalam ketatanegaraan yang tiada bandingannya diseluruh permukaan bumi.

Anhar Gonggong (1990:243) mempertegas pula bahwa inti tulisan dan pemikiran Kahar Muzakkar adalah perlunya merubah sistem ketatanegaraan

Indonesia dan sistem ketatanegaraan dunia menuju persaudaraan. Sistem ketatanegaraan itu adalah negara federal dengan berlandaskan agama Islam, dan sistem itulah yang dianggapnya sebagai sistem ketatanegaraan yang ideal.

4.3.3 Negara Federal Indonesia

Keadilan menurut Abdul Kahar Muzakkar merupakan suatu dasar terbentuknya suatu negara. Dan keadilan yang terpenting menurutnya adalah keadilan yang berpusat pada masalah hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dalam hal ini ia mengaitkannya dengan masalah hubungan sosial. Sehingga ia menggagas bentuk negara federal Indonesia untuk membangun keadilan tersebut (Anhar Gonggong, 1990:324).

Abdul Kahar Muzakkar tidak sepenuhnya berpendapat bahwa politik sentralisasi itu sesuatu yang buruk. Politik sentralisasi sebenarnya bisa menjadi jalan keluar yang efektif dari ketidakjelasan dan konflik otoritas. Persoalan baru muncul ketika orang mempersalahkan tingkat dari sentralisasi itu sendiri. Meskipun sebenarnya sentralisasi penuh atau *absolute* tidak mungkin diwujudkan oleh siapa pun yang memegang kekuasaan. Maka sentralisasi akan berkembang menjadi otoritas dan kekuasaan itu menjadi kekuasaan yang tidak demokratis lagi karena terpusat hanya pada pemerintahan pusat saja. Permasalahan sentralisasi kekuasaan inilah yang ingin dirombak oleh Abdul Kahar Muzakkar dengan gagasannya mengenai negara federal Indonesia (Syihabuddin, 2006:166).

Gagasan negara federasi ini sebenarnya bukan tatanan politik kekuasaan yang didistribusikan ke daerah-daerah, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kekuasaan tersebut tersebar secara proporsional ke setiap cabang-cabang kekuasaan yang ada. Sehingga penjabaran dari cabang-cabang kekuasaan tersebut adalah ide perlu dibentuknya negara-negara bagian diluar pemerintahan pusat (Kahar Muzakkar, 2008:81).

Sebagai penjabaran dari konsepnya tentang model pemerintahan yang demokratis, Abdul Kahar Muzakkar mengusung ide tentang perlunya dibentuk negara-negara bagian disamping pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat bercorak presidential, yaitu pemerintahan yang dikepalai oleh Presiden selaku kepala pemerintahan atau kepala negara bersama dengan suatu dewan pemerintahan (kabinet) yang terdiri dari menteri-menteri yang langsung dipilih oleh rakyat secara demokratis (Anhar Gonggong, 1990:383).

Sedangkan negara-negara bagian dikepalai oleh senat yaitu dewan rakyat dan dewan bangsa. Dewan rakyat ialah dewan yang mewakili rakyat negara dengan batas ketentuan jumlah yang ditetapkan untuk seorang wakil rakyat. Dewan bangsa, ialah dewan yang mewakili masing-masing suku bangsa dari negara bagian yang bergabung dalam negara persatuan yang diwakili oleh dua orang wakil setiap negara bagian (Kahar Muzakkar, 2008: 78).

Dalam hubungannya dengan ide pembentukan negara bagian, menurut Abdul Kahar Muzakkar (2008:82) perlu dibuat standarisasi acuan sebagai pedoman

pembentukan negara bagian tersebut. Ia menyebutkan bahwa negara-negara bagian dapat dibentuk berdasarkan :

1. Menurut *administrative indeling* Indonesia dimasa penjajahan Belanda. Daerah-daerah tingkat provinsi di Jawa dan daerah-daerah tingkat residensi di luar Jawa, dengan melalui syarat-syarat yang ditentukan dalam UUD negara atas itu, dapat dibentuk menjadi negara-negara bagian.
2. Daerah-daerah suku bangsa Indonesia yang besar, seperti Jawa, Madura, Pasundan, Aceh, Minangkabau, Batak, Dayak, Banjar, Makasar, Mikongga-Marunene, Toradja, Buton, Gorontalo, Minahasa, Ambon, Ternate, Irian Barat, dan lain-lain, dengan melalui perhitungan *sjarat-sjarat* yang ditentukan dalam UUD negara atas itu, dapat dibentuk menjadi negara-negara bagian.
3. Daerah-daerah suku bangsa Indonesia yang kecil diluar pulau Jawa, ditambah dengan penduduk yang dipindahkan dari pulau Jawa, dengan melalui perhitungan syarat-syarat yang ditentukan dalam UUD negara atas itu, dapat pula dibentuk menjadi negara-negara bagian.

Selain itu, menurut Abdul Kahar Muzakkar negara-negara bagian dapat pula ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara suku-suku bangsa yang secara historis-geografis mendiami wilayah-wilayah tertentu seperti : negara bagian Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan Utara, Irian Barat, Maluku Selatan, NTT, NTB, Bugis dan Makasar, Kalimantan Brata, sumatera Selatan, Riau, Sumatera Timur, Sumatera Barat dan Tengah, Jawa dan Madura, Aceh dan Negara bagian Pasundan (Syihabuddin, 2006:140).

Menurut Abdul Kahar Muzakkar, masing-masing negara bagian dapat merumuskan sistem pemerintahannya sendiri berdasarkan ajaran agama dan keyakinan masing-masing sesuai ketentuan UUD sebagai rujukan pokok. Dengan demikian, masing-masing golongan suku bangsa dapat hidup secara bebas merdeka dalam ikatan pemerintahan demokratis Indonesia.

4.4 PENGARUH PEMIKIRAN POLITIK ABDUL KAHAR MUZAKKAR

4.4.1 Pengaruh Pemikiran Politik Abdul kahar Muzakkar Terhadap Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan

Sejak tanggal 7 Agustus 1953, secara resmi Kahar Muzakkar dan pasukannya benar-benar bergabung dengan gerakan DI/TII Kartosoewirjo di Jawa Barat. Sehingga pasukannya tidak lagi bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) melainkan berubah menjadi Tentara Islam Indonesia (TII). Dan itu berarti telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dari gerakan yang dipimpinnya. Perubahan yang dimaksud dijelaskan oleh Anhar Gonggong (1990:244) adalah perubahan yang menyangkut kedalam dua hal yaitu : (1) Ideologi gerakan dan (2) Tujuan gerakan.

Sehingga otomatis ketika Kahar Muzakkar dan pasukannya lebih memilih ideologi Islam dibanding Komunis atau nasionalis, dan bergabung dengan Darul Islam Tentara Islam Indonesia pimpinan Kartosoewirjo, maka secara tidak langsung Kahar Muzakkar harus mengikuti ide dan cita-cita yang digagas oleh Kartosoewirjo yaitu terbentuknya Negara Islam Indonesia.

Namun Kholid O. Santosa (2009:201) melihat bahwa ketika pernyataan kesediaan Kahar Muzakkar untuk bergabung dengan Darul Islam dan menerima pengangkatannya sebagai Panglima Divisi Hasanuddin, ia menyatakan pula bahwa ia tidak dapat sepenuhnya mengabdikan diri terhadap Negara Islam Indonesia yang dikehendaki oleh Kartosoewirjo. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa sebenarnya Abdul Kahar Muzakkar tidak sepenuhnya memiliki persamaan pemikiran dengan Kartosoewirjo apalagi dalam hal konsep negara dan pemerintahan Indonesia.

Pendapat penulis di atas selaras dengan pendapat C.V Dijk (1983:175) yang menyatakan bahwa hubungan antara gerakan Darul Islam di Sulawesi Selatan dengan di Jawa Barat tampaknya tidak begitu akrab. Tidak adanya tanda-tanda semacam tuntutan Ideologi yang mendalam yang diberikan Kartosoewirjo terhadap Darul Islam di Sulawesi Selatan. C.V Dijk memperjelas pula dengan menyatakan bahwa Kahar Muzakkar pun sepertinya tidak menilai tinggi konsep politik Negara Islam Indonesia yang digagas oleh Kartosoewirjo.

Dengan demikian, gerakan Abdul Kahar Muzakkar ini pada dasarnya sejak awal tidak dimaksudkan untuk memperjuangkan ide-ide Islam. Bahkan dalam rentang waktu 1950-1965 selama gerakannya berlangsung, hanya dalam kurun waktu antara Agustus 1953 sampai dengan 1960, Abdul Kahar Muzakkar bertindak atas nama Negara Islam Indonesia. Karena dalam kurun waktu antara tahun 1950 sampai sebelum 7 Agustus 1953, ia belum menggunakan simbol-simbol Islam sebagai dasar gerakannya.

Sehingga hanya dalam kurun waktu 7 (1953-1960) tahun saja Kahar Muzakkar dan pasukannya dikatakan bertindak atas nama Negara Islam Indonesia (NII) dan selanjutnya banyak sumber yang mengatakan bahwa telah terjadinya pertentangan antara Kartosoewirjo sebagai imam dan pimpinan tertinggi gerakan DI/TII dengan Kahar Muzakkar yang merupakan pemimpin DI/TII di Sulawesi Selatan. Anhar Gonggong (1990:381) menjelaskan bahwa keretakan yang terjadi antara tahun 1960an ini diperoleh dari salah seorang pemimpin DI di Sulawesi

Selatan, yaitu Letkol Kahar Muang yang menyatakan bahwa Kahar Muzakkar sudah lama dipecat oleh Kartosoewirjo.

Hal ini bagi penulis merupakan sebuah bukti bahwa memang sudah dari awal Kahar Muzakkar dan Kartosoewirjo mempunyai ide dan cita-cita yang berbeda mengenai konsep Negara Indonesia, walaupun sama-sama berideologi Islam. Dan analisis penulis bahwa pertentangan ini terjadi akibat perbedaan tersebut.

Jika informasi ini benar bahwa Kahar Muzakkar telah dipecat oleh Kartosoewirjo pada tahun 1960an maka jelas alasan Kahar untuk bergabung dengan PRRI/PERMESTA tahun 1960an. Dengan membentuk Republik Persatuan Indonesia (RPI) Dan hal ini bisa dijadikan alasan bagi Kahar untuk mencari bantuan dari selain DI/TII Kartosoewirjo di Jawa Barat. Namun ketika ia berusaha untuk bergabung dengan PRRI ternyata ia tidak bisa mengandalkan PRRI karena tidak lama setelah itu, banyak tokoh-tokoh PRRI menyerahkan diri kepada Republik sehingga situasi seperti ini membuka peluang bagi Kahar Muzakkar untuk mengambil jalannya sendiri untuk mencapai tujuan perjuangannya selama ini.

Sehingga dari gambaran diatas jelas terlihat pengaruh dari pemikiran politik Abdul Kahar Muzakkar terhadap gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan yaitu dengan isu dipecatnya Kahar dari DI/TII oleh imam Kartosoewirjo dan berusaha untuk memperjuangkan pemikirannya sendiri dengan membentuk RPII yaitu Republik Persatuan Islam Indonesia. Karena memang sejak dari awal Kahar menginginkan bentuk negara federal yang terdiri dari negara-negara bagian, bukan bentuk negara kesatuan yang digagas Kartosoewirjo.

Sesuai dengan penjelasan dari Anhar Gonggong (1990:389) bahwa pembentukan Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII) merupakan wujud dari perbedaan antara Kartosoewirjo dan Kahar Muzakkar, bahwa RPII bukan NII. Walaupun Van Dijk, menjelaskan bahwa Kahar Muzakkar memproklamasikan RPII hanyalah sebuah kekurangan komunikasinya antara DI/TII di Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.

Analisis penulis lebih setuju dengan pendapat Anhar Gonggong yang menjelaskan bahwa RPII bukanlah NII. Karena Kahar lebih cenderung memiliki pemikiran yang berbeda dengan Kartosoewirjo, sehingga ketika Kahar tidak lagi bergabung dengan DI/TII Kartosoewirjo maka untuk menunjukkan perbedaan tersebut maka Kahar memproklamirkan adanya RPII. Menurut penulis, arti dari Republik Persatuan dari kepanjangan RPII ini merupakan indikasi dari bersatunya negara-negara bagian dalam suatu negara Republik Islam.

Walaupun Kahar Muzakkar tidak lagi bersama-sama dengan Kartosoewirjo, tetapi ideologi Islam tetap menjadi dasar dari pemikiran Kahar Muzakkar. Secara tegas Anhar Gonggong (1990:389) menjelaskan bahwa Kahar Muzakkar menolak dua proklamasi penting di negeri ini, baik yang diwujudkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta, ataupun yang diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1949 oleh Kartosoewirjo, maka Kahar Muzakkar melangkah sendiri dengan bentuk negara yang ditujunya yaitu, Khilafah, Republik berdaulat berdasarkan Al-Quran dan Hadist.

Setelah mendirikan RPII pada tanggal 14 Mei 1962, maka Abdul kahar Muzakkar membentuk sebuah Kabinet RPII yang susunannya (Anhar Gonggong, 1990: 394):

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Menteri pertahanan | : Gerungan |
| 2. Menteri Muda pertahanan | : Sanusi Daris |
| 3. Menteri Kehakiman | : H. Djunaidi Sulaiman |
| 4. Menteri Keuangan | : H. Djunaidi Sulaiman |
| 5. Menteri Penerangan | : Soemarsono |
| 6. Menteri Pendidikan | : H. Abdul Rahman Ambo Dalle |
| 7. Menteri Muda Pendidikan | : B.S. Baranti |

Masih menurut Anhar Gonggong (1990: 394), dalam susunan pemerintahnya, Kahar Muzakkar menyebutkan adanya jabatan Ajudan Jenderal dan Ajudan yang masing-masing di duduki oleh Chaidir Achmad dan Amir. Sedangkan untuk Abdul Kahar Muzakkar sendiri pastinya sebagai Pejabat Khilafah atau Kepala Negara RPII.

Sehingga dari penjelasan diatas, sangat jelas terlihat sekali pengaruh dari pemikiran Kahar Muzakkar terhadap gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Kahar lebih mengutamakan ide dan pemikirannya walaupun harus lepas dari DI/TII Kartosoewirjo di Jawa Barat. Walaupun tidak banyak yang tahu tentang hal ini namun fakta membuktikan bahwa semenjak tahun 1962an Kahar Muzakkar dan pengikutnya sudah tidak lagi bersama dengan DI/TII Kartosoewirjo, sampai kematiannya pada tanggal 3 Februari 1965.

4.4.2 Pengaruh Pemikiran Politik Abdul Kahar Muzakkar Terhadap Masyarakat Sulawesi Selatan

Keberlangsungan gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan yang merupakan bagian dari langkah pemikiran Abdul Kahar Muzakkar tentulah menimbulkan berbagai akibat baik itu dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi dan bahkan juga moral. Akibat yang ditimbulkan jelas berakibat terhadap kondisi dan situasi serta masyarakat Sulawesi Selatan khususnya dan umumnya untuk seluruh wilayah Indonesia.

Permulaan pertentangan Abdul Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan adalah ketika permasalahan gerilyawan yang akan masuk APRIS namun ditolak oleh Kawilarang. Jika saja ia menerima penolakan tersebut, maka tidak akan ada pertentangan berkelanjutan di Sulawesi Selatan. Tetapi jika pun Kahar Muzakkar pada saat itu menolak keputusan Kawilarang dan bergabung dengan KGSS, tetapi pertentangan itu seharusnya cepat selesai ketika Kahar Muzakkar mau berunding dengan APRIS dan berusaha mengakhiri pertentangannya dengan pemerintah dan tidak bergabung dengan DI/TII Kartosoewirjo di Jawa Barat maka pertentangan ini tidak akan berlarut-larut sampai 15 tahun.

Namun semua telah terjadi, dan fakta membuktikan bahwa Kahar Muzakkar tidak hanya sekedar menginginkan sebuah Jabatan didalam APRIS melainkan ia memiliki sebuah pemikiran politik mengenai konsep negara dan pemerintahan Indonesia yang menurutnya paling ideal. Pemikiran yang ia impikan pastinya pada saat itu bertentangan dengan konsep negara dan pemerintahan Indonesia yang sudah

ada sehingga menimbulkan pertentangan yang lebih jauh dengan pemerintah. Sehingga ia akhirnya dinyatakan sebagai pemberontak dan musuh negara.

Dalam kaitannya dengan pengaruh pemikiran politik Abdul Kahar Muzakkar terhadap masyarakat Sulawesi Selatan. Anhar Gonggong (1990: 400) menyatakan dengan tegas bahwa dampak atau pengaruh dari pemikiran politik Abdul Kahar Muzakkar terhadap masyarakat Sulawesi Selatan adalah membuat keadaan dan kondisi Sulawesi Selatan pada saat itu menjadi kacau. Kesimpulan ini diperjelas bahwa kurang lebih selama 15 tahun, Sulawesi Selatan mengalami kekacauan hampir disegala aspek kehidupan.

Disiplin negara yang dalam hal ini melaksanakan administrasi kehidupan bernegara yang seharusnya berdasarkan atas aturan-aturan administrasi yang telah dibuat oleh lembaga-lembaga negara, tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, penataan pemerintah tidak berjalan dengan baik. Keadaan yang demikian makin melumpuhkan jalannya pemerintahan di Sulawesi Selatan. Pemerintahan di daerah Sulawesi Selatan dapat dikatakan tidak ada yang berjalan secara normal. Krisis pemerintahan didalam suatu daerah juga karena adanya pertentangan di dalam daerah tersebut (Anhar Gonggong, 1990: 403).

Kemacetan pemerintahan pada hampir semua daerah di Sulawesi Selatan, dengan sendirinya akan memberikan pengaruh pada aspek lainnya, terutama pada aspek ekonomi. Tidak mudah juga bagi pemerintahan disuatu daerah di Sulawesi Selatan untuk mengatur kehidupan perekonomiannya, karena secara de Facto sumber-sumber perekonomian tersebut dikuasai oleh "pemerintah NII di daerah tersebut".

Seperti komoditi utama Sulawesi selatan adalah Beras dan Kopra. Kedua sumber perekonomian ini dikuasai oleh DI/TII karena memang penanaman padi dan kopra berada dipedalaman.

Penguasaan sumber ekonomi dipedalaman oleh NII pun menyebabkan masyarakat harus menyingkir ke daerah-daerah lain untuk menghindari kekacauan dan kesulitan hidup dipedalaman. Jika pun mereka bertahan dan mencoba untuk bertahan hidup dipedalaman, pasti hasil bertani mereka harus diserahkan kepada pemerintahan NII.

Selain keadaan ekonomi yang kacau, hal yang penting yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan adalah keadaan sosial, ketentraman dan keamanan masyarakat pada periode tersebut. Satu hal yang penting yang memprihatinkan, terutama untuk daerah-daerah pedalaman adalah masalah pendidikan. Dapat dikatakan bahwa bidang ini cukup terlantar pada saat itu.

Demikianlah dari uraian diatas, nampak bahwa pengaruh dari pemikiran politik Kahar Muzakkar adalah terjadinya pertentangan antara Kahar Muzakkar dengan pemerintah di Sulawesi Selatan. Pertentangan ini sangat mempengaruhi situasi dan kondisi masyarakat Sulawesi Selatan selama kurang lebih 15 tahun. Berlangsungnya gerakan DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan ini sangat mempengaruhi dan berdampak negatif diberbagai bidang kehidupan. Bukan hanya karena tekanan dari operasi-operasi militer yang dilakukan oleh pasukan-pasukan Republik Indonesia, melainkan juga disebabkan oleh keadaan yang berkembang didalam gerakan DI/TII sendiri (Anhar Gonggong, 1990: 412).

Dalam sub bab ini kita bisa melihat gambaran bahwa akibat yang dilahirkan dari gerakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan ini, tidak hanya menimpa para pendukungnya saja, melainkan dan terutama menimpa rakyat kecil yang memang tidak berdaya dan tidak berdosa. Selain itu, anak-anak usia anak sekolah yang seharusnya hidup tenang dengan pendidikan yang layak juga merasakan kepedihan ini. Sebuah akibat yang melahirkan penderitaan yang mungkin masih dirasakan oleh sebagian masyarakat Sulawesi Selatan yang masih hidup sekarang ini.

